



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini adalah merupakan salah satu wujud diimplementasikannya good governance dan adanya tanggung jawab instansi untuk melaporkan kepada pemberi mandat dan pemangku kepentingan atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini akan memberi arti bagi para penggunanya dan sebagai salah satu bentuk gambaran peranan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menuju " Good Governance ".

Samarinda, 15 Pebruari 2021

Inspektur,


Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740818 199703 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dicapai pada tahun 2020 serta seluruh program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan atas dokumen Penetapan Kinerja 2020 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini juga menyajikan semua capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja dan Program serta Kegiatan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja baik pada level output maupun outcome kegiatan yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis-analisis yang dilakukan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini juga dapat mengidentifikasi sejumlah keberhasilan kinerja yang telah dicapai dan kegagalan-kegagalan sebagai perbaikan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan komitmen seluruh unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam

merealisasikan tanggung jawabnya kepada stakeholder. Target dan indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Penilaian kinerja atas Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 dilakukan terhadap indikator output maupun outcome kegiatan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 dengan cara membandingkan antara target indikator dengan realisasinya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 menggambarkan dan menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan 4 (empat) sasaran, 17 (tujuh belas) indikator dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 87,02%. Sedangkan untuk pencapaian 10 Program dan 31 Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan capai fisik **100%** dan realisasi keuangan 89,73%. Untuk melaksanakan semua aktivitas tersebut disediakan dana sebesar Rp. 24.377.419.592,50 dengan realisasi sebesar Rp. 21.874.312.715,00 (89,73%) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.987.957.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.900.758.129,00 (83,93%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.389.462.592,50 dengan realisasi sebesar Rp. 10.973.758.586,00 (96,35%)

Dalam penyerapan anggaran secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran, tetapi secara kualitatif, pencapaian telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal dan bertanggung jawab berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Sisa anggaran terjadi karena adanya efisiensi dalam pengguna anggaran, namun secara fisik telah dilaksanakan 100%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program serta kegiatan masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, namun dapat diatasi dengan baik dan sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan, maka telah diambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit agar tercipta peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi realisasi perjanjian kinerja dan kualitas sumber daya manusia / personil aparat pengawasan selaku APIP.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja yang dipergunakan sebagai alat pembanding pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Aspek Strategis Organisasi	6
F. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi (Isu Strategis)	8
G. Sarana dan Prasarana Kerja	9
 BAB II	
PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
 BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Impelementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	27

B.	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	29
C.	Analisis Capaian Kinerja	32
1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kerja Tahun ini	32
2.	Membandingkan Antara Realisasi Kerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir	49
3.	Membandingkan Realisasi Kerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RPJMD/Renstra	59
4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	62
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah dan Akan Dilakukan	63
6.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	74
7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	75
D.	Realisasi Anggaran	80
1.	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	80
2.	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	87
BAB IV	PENUTUP	91

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 s.d. 2023
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dan 2020 secara berjenjang
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019 dan 2020
4. Rencana Aksi Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2019 dan 2020
5. Rencana Kerja Tahun 2019 dan 2020

6. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Prov. Kaltim Tahun Sebelumnya (Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya).
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan	6
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	9
Tabel 3	Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2019 s.d. 2023	14
Tabel 4	Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran	16
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22
Tabel 7	Target Belanja Tahun 2020	24
Tabel 8	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	25
Tabel 9	Hasil Evaluasi Tahun 2020 atas LKjIP Tahun 2019	27
Tabel 10	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2020 atas LKjIP Tahun 2019	28
Tabel 11	Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2020	30
Tabel 12	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dipenghujung bulan Desember 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu tugas Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pengawasan, maka

Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan, asset dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 53 Tahun 2016, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

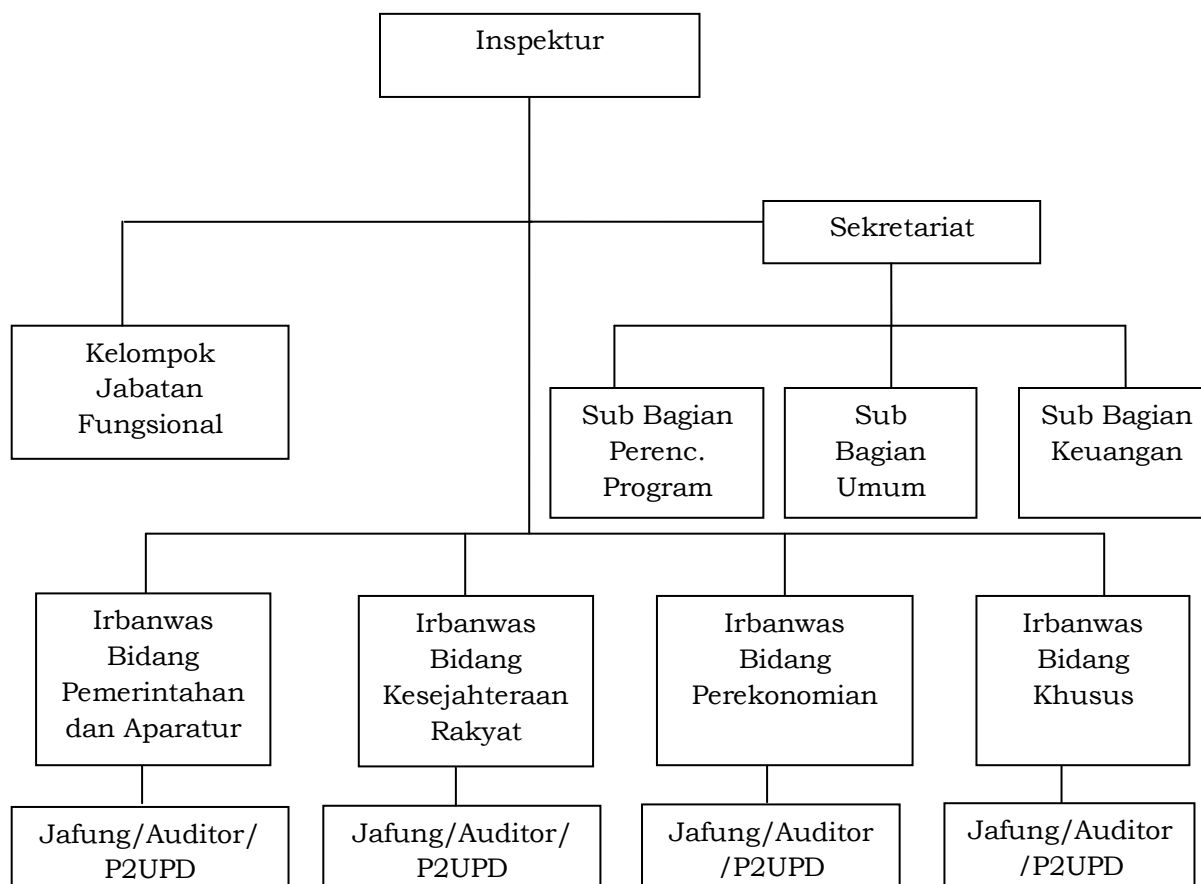
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program.
 - 2. Subbagian Umum.
 - 3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



D. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 berjumlah pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 106 orang yang terdiri dari 77 orang PNS/ASN dan 29 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 106 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Tabel 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	22	12	6	28	-	-	5	29	-	-	-	-
Fungsional Umum	22	12	1	26	6	1	2	21	2	7	1	-
Jumlah PNS	50	27	14	56	6	1	11	56	2	7	1	-
Jumlah Honor/PTT	14	15	-	-	-	-	1	17	2	9	-	-
Jumlah PNS dan PTT	64	42	14	56	6	1	12	73	4	16	1	-

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Aspek strategis organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, adalah baik aspek strategis internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. **Aspek Peraturan Perundang-Undangan**, dukungan peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis bagi organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. **Aspek Kompetensi SDM**, dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik segi kualitas dan kuantitas.
3. **Aspek Produk Yang Dihasilkan**, kekuatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, hal ini sesuai dengan amanat PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008 harus bersifat strategis. Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Gubernur yang menjalankan amanah rakyat.
4. **Aspek Metode Pengawasan**, perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program pemeriksaan/pengawasan, reviu, evaluasi dan monitoring, pemberian advis/saran dan konsulting dan kontrol internal.
5. **Aspek Sistem Penghargaan (Reward System)**, sistem penghargaan merupakan cara organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada pegawai dalam rangka menjaga keselarasan kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai atau pengukuhan atas perilaku yang telah dilakukan pegawai. Sistem penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi, mendorong pencapaian misi dan strategi organisasi, dan membantu mencapai keberlangsungan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai *shareholder*.
6. **Aspek Budaya Organisasi**, yang meliputi :
 - a. **Integritas**, suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh Aparatur Pengawasan untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas pribadi dan organisasi.
 - b. **Profesional**, kesanggupan seluruh Aparatur Pengawasan untuk melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi sikap dan semangat kerja tinggi,

berkomitmen, pantang menyerah dan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan yang tinggi.

- c. **Obyektif**, sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- d. **Independent**, sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedapankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
- e. **Perbaikan terus menerus**, sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan Organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI (ISU STRATEGIS)

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah

Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018.

3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran, khususnya untuk kegiatan pengawasan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu adanya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2020 :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah	4.385	M2
2.	Gedung Kantor	2.300	M2
3.	Ruang Rapat	2	Ruang
4.	Ruang Kerja Pejabat Struktural	9	Ruang
5.	Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum	9	Ruang
6.	Ruang Arsip	7	Ruang
7.	Ruang Perpustakaan	1	Ruang
8.	Ruang Musholla	2	Ruang

9.	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
10.	Ruang Gudang Barang	4	Ruang
11.	Taman	1	Area
12.	Kendaraan Bermotor Roda 4	25	Buah
13.	Kendaraan Bermotor Roda 2	13	Buah
14.	Meja Kerja	151	Buah
15.	Meja Komputer	16	Buah
16.	Meja Rapat	8	Buah
17.	Meja Makan	1	Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan	5	Set
19.	Kursi Putar	269	Buah
20.	Kursi Tamu	15	Set
21.	Kursi Lipat (Rusak Berat)	44	Buah
22.	Kursi Rapat	30	Buah
23.	Lemari Besi Arsip	36	Buah
24.	Lemari Perpustakaan	2	Buah
25.	Filling Cabinet	29	Buah
26.	Buffet	13	Buah
27.	Komputer / Computer / PC	53	Unit
28.	Printer	66	Unit
29.	Laptop	65	Buah
30.	Dispenser	9	Buah
31.	Mesin Tik	3	Buah
32.	Pesawat Telepon	10	Buah
33.	Kamera	7	Buah
34.	Jam Dinding	4	Buah
35.	Mesin Photo Copy	2	Buah
36.	Whiteboard	6	Buah
37.	Proyektor / LCD	9	Buah
38.	AC Split	6	Buah
39.	Brandkas	2	Buah
40.	Microphone	27	Buah
41.	Intercom Mobil	1	Buah
42.	Buku Perpustakaan	885	Buah
43.	Mesin Absensi	3	Buah
44.	Kulkas	6	Buah
45.	Sound System	1	Set
46.	Speaker Besar	1	Pasang
47.	Ampliplayer	1	Unit
48.	TV Led	1	Unit
49.	Sofa	1	Unit
50.	Lemari Hias	1	Buah
51.	Mesin Cuci	1	Buah
52.	Karpet	3	Buah
53.	Rak Buku / TV	2	Set

54.	Organ / Electone	1	Buah
55.	Wireless	1	Buah
56.	Tempat Tidur	1	Set
57.	Lemari Pakai	2	Buah
58.	Water Heather	1	Buah
59.	Monitor CCTV	1	Buah
60.	Lensa CCTV	2	Buah
61.	Handy Talkie	3	Buah
62.	Locker Rak	8	Buah
63.	Komputer Mainframe / Server	1	Unit
64.	Jaringan Komputer	1	Unit
65.	Software Off-Line Komputer	3	Unit
66.	Rak Peralatan	1	Buah
67.	Mesin Hitung Manual	1	Buah
68.	Alat Ukur Altimeter	8	Buah
69.	CPU	1	Buah
70.	GPS	4	Buah
71.	Faximale	1	Buah
72.	Tape Rocerder	4	Buah
73.	Genset	1	Unit
74.	E-Spot Asfalt Highway	1	Set
75.	Gorden	3	Set
76.	Lemari Rak Arsip Besi	50	unit
77.	Handy Cam	2	unit
78.	Finger Print	4	unit
79.	Tablet / Gadget	6	unit
80.	Perangkat Meeting On Desk (MOD) Conference	1	set
81.	Meja Kerja Staf	25	Unit
82.	Kursi Kerja Staf	25	Unit
83.	Scanner	8	Unit
84.	PC All In One	15	Unit
85.	Meteran Roda	2	Buah
86.	Hard Disk	6	Buah
87.	Brite Screen Tripod	1	Buah
88.	Penghancur Kertas	4	Buah
89.	Lemari ½ Biro	6	Buah
90.	Aplikasi Pengawasan + Sim HP	2	Perangkat

Dari perlengkapan berupa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sudah dirasakan mencukupi dalam menunjang tugas-tugas dibidang pengawasan, meskipun dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pada perangkat daerah tidak ada lagi visi dan misi perangkat daerah, sedangkan visi dan misi perangkat daerah tersebut mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah atau gubernur dan wakil gubernur terpilih.

Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Visi.

“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat “

2. Misi.

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

3. Tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peran untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Instansi pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.
4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran.

4. Sasaran.

Salah satu unsur dalam pencapaian kinerja yang akan memberikan hasil capaian kinerja yang optima, agar lebih dicapai tingkat keberhasilannya yang sudah ditargetkan, maka Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disajikan secara singkat gambaran penting dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023 yang memuat antara lain Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Target Tahunan dan Program./Kegiatan serta IKU yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 s.d. 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Maturitas SPIP Pemda Level 3	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	1	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			2	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	0	2	4	6	8	10	
			3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	88	90	92	95	98	100	
			4	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	75	80	85	90	95	100	
			5.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	%	70	80	85	90	95	100	
			6	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	27	29	31	33	34	36	
			7	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2	3	3	3	3	4	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan an Daerah.	Maturitas SPIP Pemda Level 3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	5	5	6	6	7	7	
			2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	5	5	6	6	7	7	
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dari KKN	Hasil Penilaian Integritas Pemda Skor 85	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	1	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
			2	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :								
				LHKPN	%	54	60	65	70	75	80	
				LHKASN	%	50	60	65	70	75	80	
			3	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lap	10	15	20	25	30	35	
			4	Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	60	65	70	75	80	85	
			5	Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	1	1	1	1	
			6.	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	-	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP Pada Level 3	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	1	Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	3	3	3	3	4	
			2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	35	50	55	55	60	65	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	0	80	85	90	95	100	
			2.	Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	0	1	2	3	4	5	
			3.	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%	70	80	85	90	95	100	
			4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	75,39	76	78	80	81	82	

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja, maka diperlu adanya Program dan Kegiatan yang menunjang sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4

Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4		5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	1.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	Program Penjamin Mutu Keuangan	Reviu Atas Laporan Keuangan
			2	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	PD	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Pemeriksaan Kinerja OPD
			3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan	%		Pemeriksaan Operasional OPD

				Perangkat Daerah			
			4	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
			5.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti/ ditangani	%		
			6	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level		Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan
			7	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq B	PD	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Pemprov
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Evaluasi EKPPD Kab/Kota
			2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Kategori B	Kab/Kota		Evaluasi SAKIP Kab/Kota
2.	Terwujud nya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih dari KKN	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	1	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	Program Pencegahan KKN	Pemeriksaan Khusus / Investigasi
				Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian			Monev LHKPN dan LHKASN
			3	LHKPN	%		Pengendalian Gratifikasi
				LHKASN	%		
				Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Lap		

			4	Skor Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor		Survey Penilaian Integritas
			5	Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	PD		Pembangunan Zona Integritas
			6.	Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
3.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	1	Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Peningkatan Level Kapabilitas APIP
			2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
			2.	Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	Program Peningkatan Saran dan Prasarana	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan prasarana
			3.	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
							Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

						Daerah	
			4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalam Renstranya tahun 2019 s.d. 2023 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan dasar dari Penetapan Kinerja yang akan ditetapkan setiap tahunnya dengan targetnya selanjutnya akan dicapai dengan dukungan program dan kegiatan. Penetapan Indikator Utama ini didasarkan atas tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Timur serta disesuaikan dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Berikut ini disampaikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran dari tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 s.d. 2023.

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I	Inspektur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Jumlah Perangkat Daerah Yang berkinerja " Tinggi "	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja " Tinggi " sesuai hasil pemeriksaan/Audit	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Belum optimalnya capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan operasional	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di bagi pagu anggaran Program dan Kegiatan di kali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq B	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP kategori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim.	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Inspektur
		Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	Belum optimalnya tindak lanjut atas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelanggaran Disiplin	Inspektur Bidang Pengawasan Khusus.
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Kategori " B "	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP kategori B	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
				dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Perangkat Daerah	an
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat	Inspektur Bidang Pengawasan Khusus.
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi	Unit Pengendalian Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey	Inspektoral berkerjasama dengan BPS dan KPK.
		Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM	Tim Internal dan Eksternal ZI Menuju WBK/WBBM
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Belum optimalnya nilai/skor penilaian atas RB pada Perangkat Daerah	Nilai / Skor RB yang didapat setelah dilakukan evaluasi melalui LKE RB	Laporan Hasil Penilaian RB PD	Tim RB Inspektoral
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	Inspektoral berkerjasama dengan BPKP
		Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian	Inspektur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
			terutama terhadap cakupan pengawasan			

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.

Pada tahun anggaran 2020, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Timur dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja Tahun 2020 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2
		c.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3
		d.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	92
		e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29
		d.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80
		f.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	85
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	6
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	6

3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100
		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	65 65
		d.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20
		e.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	70
		f.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1
		g.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55

1. Rencana Anggaran Tahun 2020

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka pada tahun 2020 berdasarkan arah kebijakan, ditetapkan program sebanyak 10 (sepuluh) dengan kegiatan sebanyak 14 (empat belas), dengan alokasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 24.377.419.592,50 yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 12.987.957.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 11.389.462.592,50

Realisasi anggaran tahun 2020 dari anggaran sebesar Rp. 24.377.419.592,50 adalah sebesar Rp. 21.874.312.715,00 (89,73%) yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.900.755.129,00 (83,93%) dan Anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 10.973.554.586,00 (96,35%)

2. Target Belanja Tahun 2020.

Dari dari anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 24.377.419.592,50 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 12.987.957.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 11.389.462.592,50 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 21.874.312.715,00 (89,73%)

Adapun realisasi keseluruhan Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) sebagaimana perincian sebagai berikut :

Tabel 7
Target Belanja Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020		%
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp)	
1.	Belanja Tidak Langsung	12.987.957.000,00	10.900.758.129,00	83,93
2.	Belanja Langsung	11.389.462.592,50	10.973.554.586,00	96,35
	JUMLAH	24.377.419.592,50	21.874.312.715,00	89,73

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020.

Dari dari anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 11.389.462.592,50 , maka dapat dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dengan persentase adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	1.371.362.800,00	12,04	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Reviu Atas Laporan Keuangan • Pemeriksaan Kinerja • Pemeriksaan Operasional OPD • Peningkatan Level Kapabilitas APIP • Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda Provinsi • Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kab/Kota	990.476.000,00	8,70	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi EKPPD Kab/Kota • Evaluasi SAKIP Kab/Kota
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	420.629.100,00	3,70	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Khusus /Investigasi • Monev

				LHKPN dan LHKASN <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Gratifikasi • SPI • Pemb. Zona Integritas • Penilaian Mandiri RB
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	986.895.300,00	8,67	Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pengemb. Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan • Peningkatan Level Kapabilitas APIP

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 700/1316-Khusus/Itprov/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan hasil Evaluasi sebesar **79,15** atau predikat “ **BB** “ (**Sangat Baik**), sebagaimana tabel hasil evaluasi berikut ini :

Tabel 9
Hasil Evaluasi Tahun 2020 Atas LKjIP Tahun 2019

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2018	Nilai 2019	Tambah /Kurang /Tetap
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,36	26,38	+ 0,02
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,31	20,63	+ 0,32
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,22	12,22	Tetap
4.	Evaluasi Kinerja	10	8,29	8,08	- 0,21
5.	Capaian Kinerja	20	11,66	11,85	+ 0,19
	Nilai Hasil Evaluasi	100	78,85	79,15	+ 0,3
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi.

Sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap LKjIP Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2020 terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti, yaitu :

Tabel 10
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2020 atas
LKjIP Tahun 2019

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP DARI
INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN SEBELUMNYA TAHUN 2019
(REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTINYA)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Belum / Sudah
1.	<p>Rencana Aksi atas Kinerja dimonitor</p> <p>Pencapaiannya secara berkala, dan tidak terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja</p>	<p>Pada tahun 2020 sudah dibuatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan setiap 3 bulan dilakukan evaluasi atas target dan capaian yang telah ditetapkan beserta anggarannya 2. Pada tahun tahun 2019-2020 Pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membuat Matrik Capaian Kinerja dan pada tahun 2020 Matrik Capaian Kinerja ini ditambah dengan dibuatkan nya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020. 	<p>Sudah dibuat Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Matrik Capaian Kinerja Tahun 2020.</p>

2.	<p>Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi</p> <p>Dalam Pencapaian kinerja yang dilaporkan (output) ataupun (outcome) untuk tetap mengupayakan peningkatan pencapaian sasaran/kinerja organisasi secara optimal dengan target dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.</p>	<p>Pada tahun 2020 dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebanyak :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 3 Sasaran Strategis b. 17 Indikator Kinerja Sasaran <p>Dari hasil monev terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 indikator kinerja tercapai 100% • 3 Indikator Kinerja tercapai diatas 100% • 5 Indikator Kinerja yang capaian antara 20 % s.d 95,38% • 1 Indikator Kinerja yang tidak tercapai dengan hasil 0 %. 	<p>Pada tahun 2021 hal ini sudah dilakukan evaluasi atas penetapan kinerja, sehingga diharapkan atas target yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>Hasil evaluasi atas target indikator kinerja itu ditetapkan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021.</p>
----	--	--	---

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indiktator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yang pengesahannya dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 24 Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050.2/999.a/ltprov/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar **87,02 %** sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	2	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	2	0	0
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Capaian Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	92	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	92	96.38	104,72
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	29	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	29	29	100
					Triwulan IV	-	-	-

		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	80	81	101,25
		Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ ditangani	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	85	65	76,47
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemda Kab/ Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	6	100
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	6	6	100
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	100	100	100
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	65	Triwulan I	65	85	130,77
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	20	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	20	4	20
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	70	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	70	66,76	95,38
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	1	1	100

		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	36,30	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	36,30	24,36	67,11	
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme APIP	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	55	46	83,64	
		Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	Triwulan I	-	-	-	
					Triwulan II	-	-	-	
					Triwulan III	-	-	-	
					Triwulan IV	3	3	100	

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 17 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikator telah dicapai sebesar **87,02 %**. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi : realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	2	0	0

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 0 (nol) perangkat daerah dengan capaian 0%. Pencapaian ini berdasarkan hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 3 perangkat daerah yang menjadi sample, yaitu Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim dan RSJD Atma Husada Mahakam. Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Audit Kinerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor

:700/2043/ltprov/2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria penilaian meliputi : Sangat Tinggi (skor 90-100), Tinggi (skor 70-89), Sedang (skor 60-69), Rendah (skor 51-59) dan Sangat Rendah (skor <50). Dari hasil Audit Kinerja yang dilakukan pada perangkat daerah rata-rata nilai capaiannya adalah “ Sedang” (skor 60-69). Dari hasil audit kinerja yang dilaksanakan terhadap 3 perangkat daerah tersebut rata-rata capaian kinerja dalam katagori Sedang dengan skor 60-69, hal ini disebabkan antara lain direkomendasikan agar : a. Merumuskan pendelegasian wewenang dan kebijakan mendukung terciptanya akuntabilitas dan pengendalian; b. Membuat kebijakan atau Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan serta pendokumentasian atas pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang baik salah satunya adalah pedoman yang dibuat kemungkinan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini diperlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	92	96,38	104,72

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 92 % dan telah dicapai sebesar 96,38 % dengan capaian sebesar 104,72%, hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 96,38% dari target yang ditetapkan sebesar 92,00%, hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi

TEPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan juga dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA, serta pada tahun anggaran 2020 ini semua Perangkat Daerah mengalami pemotongan anggaran / refocusing sebesar 50% karena adanya pandemi Covid-19. Hasil capaian ini didasarkan atas Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian dari capaian tersebut memang telah melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi masih ada beberapa program dan kegiatan yang capaian belum maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain belum dilaksanakan secara maksimal atas penyerapan anggaran dan masih terdapat sisa anggaran pada setiap program dan kegiatan, karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang banyak dilaksanakan melalui Zoom Meeting / Vartual dan keterbatasan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	100

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2020 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.

Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 16 Perangkat Daerah, yaitu 9 Biro dan 7 Perangkat Daerah.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain :

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap : (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

Dari hasil evaluasi tersebut disarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.
2. Mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
3. Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian yang telah direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan implementasinya.

4. Mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) pada Website Pemda.

Pada tahun 2020 sudah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP terhadap 16 PD tersebut. Pada tahun 2021 penilaian dan evaluasi Maturitas SPIP ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain : Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	PD	29	29	100

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B pada tahun 2020 ditarget sebanyak 29 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat dengan capaian 100%. Pencapaian ini sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu dari 29 target dan dicapai 29 perangkat daerah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 37 PD dengan hasil evaluasi sebagai berikut : 15 PD dengan katagori BB/Sangat Baik, 14 PD dengan katagori B/Baik, dan 8 PD dengan katagori CC/Cukup. Dari hasil evaluasi keseluruhan terhadap SAKIP 37 Perangkat Daerah pada tahun 2020 menunjukan adanya peningkatan dengan hasil evaluasi 66,32 dengan katagori B/Baik. Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja. Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu, diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	81	101,25

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 80% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar 101,25%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini telah sesuai dan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang sesuai apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti	%	85	65	76,47

	/ Ditangani				
--	-------------	--	--	--	--

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 65 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 8 pengaduan masyarakat terkait disiplin ASN yang telah ditindak lanjuti dengan penjatuhan disiplin ASN baru mencapai 65%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena ada beberapa rekomendasi terkait hukuman disiplin belum ditindaklanjuti dengan membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan. Namun dalam rangka meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi penjatuhan disiplin ASN perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur yang membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin. Hal lain ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN yang disebabkan antara meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/ASN telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	6	6	100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi terdapat 6 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat “ Sangat Tinggi “, yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat “Tinggi” yaitu : Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya komitmen dari Pemda Kab/Kota untuk meningkatkan capai kinerja yang didukung dengan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka peningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	6	6	100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB yang dikarenakan adanya pandemi Covid-

19 pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara zoom meeting/ virtual. Terhadap capaian ini, diharapkan pada tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rencana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana dari semua 17 Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditangani dan dilakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
-----	-------------------	--------	--------	-----------	--------------

2.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian				
	LHKPN	%	65	97,84	136,13
	LHKASN	%	65	75,89	113,23

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 65% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 97,84% dengan capaian 136,13% dan penyampaian LHKASN sebesar 75,89% dengan capaian 113,23%. Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana dari jumlah yang wajib LHKPN sebanyak 816 orang dan yang telah Melaporkan sebanyak 742 orang, tepat waktu sebanyak 726 orang, terlambat sebanyak 16 orang dan yang belum menyampaikan sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk LHKASN dari yang wajib LHKASN sebanyak 4.639 orang sebagaimana yang telah ditetapkan, yang sudah lapor sebanyak 3.539 orang dan yang belum laporan sebanyak 1.100 orang. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	20	4	20,00

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 20 laporan dan telah dicapai 4 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 20%, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendah, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran untuk melakukan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi, atau juga kurangnya pengetahuan si penerima gratifikasi apa kriteria yang termasuk gratifikasi.

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi dan telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPD) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan usaha lain juga diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sekarang ini yang sudah membentuk UPG baru 3 PD yaitu : RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD Kanujoso dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	70	66,76	95,38

Pada tahun 2020 pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) tidak dilaksanakan, hal ini terkait masalah pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat dari KPK dan BPS Pusat, bahwa pelaksanaan SPI tahun 2020 tidak dilaksanakan.

Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada nilai 70 dengan capaian 66,76 ini mengacu pada capaian tahun 2019 dimana telah dilakukan oleh KPK dan BPS yang hasilnya baru disampaikan di tahun 2020. Kegiatan survey penilaian integritas pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Badan Statistik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Nota Kesepahaman antara Pemprov Kaltim dan BPS Prov. Kaltim Nomor : 119/1454.a/ltprov/2019, Nomor : 01/BPS/6400.92120/MoU/07/2019 tanggal 21 Juli 2019, yaitu dimulai dengan kegiatan sosialisasi, entry meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden sebanyak 130 responden, yaitu dari 60 responden internal dan 60 responden eksternal dan 10 responden eksper. Pencacahan responden internal dan eksternal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh BPS, sedangkan pencacahan responden eksper dilakukan oleh KPK. Terdapat 6 lokus

yang menjadi sasaran Survey Penilaian Integritas Tahun 2019, yaitu antara lain Bapenda, Dinas PUPRPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Biro Adbang Setda Prov. Kaltim. Sedangkan pemilihan eksper yang terdiri dari ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah yang disampel, yaitu Inspektorat/Pengawas Internal, Auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Pensiunan (Pejabat Eselon II), Kepala Daerah/Sekda, Asosiasi Pengusaha, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, DPRD, Advokat, Tim Saberpongli, Polda, Kejati dan Muspida. Dari hasil survey ini menunjukkan bahwa angka yang dicapai masih rendah sekitar skor/nilai 66,67 . Dalam upaya meningkatkan integritas di Pemda Prov. Kaltim berdasarkan hasil SPI tersebut, KPK merekomendasikan beberapa upaya sebagai berikut : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot project ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	100

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah, dengan capaian 100% yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani. Pada tahun 2020 ini telah diusulkan untuk di tetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada RSUD AWS Samarinda, namun berdasarkan hasil evaluasi ternyata masih belum memenuhi angka hasil evaluasi untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah ZI Menuju WBK, diharapkan pada tahun 2021 RSUD AW. Syahrani dapat diusulkan menjadi ZI menuju WBK dengan beberapa aksi yang telah dilakukan antara lain melakukan beberapa perbaikan dan pemenuhan dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi yang telah dilaksanakan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36,30	24,36	67,11

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,36 nilai atau 67,11%, hal ini belum tercapai terhadap target yang ditetapkan sebesar 36,30 nilai. Penilaian dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Bappeda, BKD, Disperindagkop, RSUD AWS, RSUD Kanujoso dan RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap aspek pengungkit dan reform, dari hasil

penilaian diperoleh angka rata-rata nilai reformasi birokrasi atas 10 PD tersebut mencapai 24,46 nilai. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Penilaian			Bobot	Nilai Rata-Rata
Pengungkit			36,30	24,36
1.	Pemenuhan		14,60	10,72
	1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,35
	2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,60
	3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,53
	4.	Penataan Tata Laksana	1,00	0,77
	5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,17
	6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,24
	7.	Penguatan Pengawasan	2,50	1,41
	8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi	2,50	1,65
2.	Reform		21,.70	13,64
	1.	Reform	21,70	13,64

Hasil rekomendasi penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Assesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k). Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPI, dan ZI (l). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya – upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme dan Profesional APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100

Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : LQAPIP-43/PW17/6/2020 tanggal 16 Maret 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil QA disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

No	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3.	Praktik Profesional	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

2. Berdasarkan hasil QA tersebut, terdapat rekomendasi untuk menjadi perhatian dan perlu tindak lanjut yaitu :
 - a. Mendorong manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP

- mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui Workshop/Bimtek /Diklat untuk mendukung kegiatan pengawasan khususnya di bidang Audit Kinerja, Keinvestigasian, PPBR, Pengelolaan Risiko serta Sertifikasi Profesi antara lain CRMP.
 - Memutakhirkan peta auditan dan menggunakan *risk register* yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun PPBR.
 - Menekankan substansi hasil pengawasan *Management Oversight* untuk perbaikan kapasitas internal APIP serta ketaatan, kinerja dan *Governance Risk Control (GRC)* Pemerintah Daerah.
 - Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan *key process area* (KPA) secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
 - Melakukan *self assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3.

Berkenaan dengan rekomendasi dari hasil QA tersebut, diharapkan kepada Tim Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat rencana kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya melaksanakan rencana kerja/rencana aksi tersebut dalam rangka mempertahankan kapabilitas level 3 dan mempersiapkan untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi lagi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	46	83,64

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2020,

jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 46 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawasan.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator keberhasilan dari kinerja yang sudah ditetapkan, dimana akan terlihat adanya peningkatan maupun penurunan dari capaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2020 ini sejalan dengan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023 terdapat sasaran dan indikator yang berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya perubahan Visi dan Misi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Berikut ini disampaikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2020
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5-1) *100
a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	Capai atas Opini WTP dapat dipertahankan.
b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	%	-	0	0	Target tidak tercapai, karena hasil Audit Kinerja terhadap perangkat daerah masih berada pada tingkat Sedang.
c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	96,82	95,39	96,38	Terjadi peningkatan pencapaian sebesar 1,04%
d.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	2	3	3	Capaian pada level 3 dapat dipertahankan.
e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq B	PD	25	28	29	Terjadi peningkatan sebesar 3,58%
f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	82	80	81	Terjadi peningkatan sebesar 1,25%
g.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	%	-	62,50	65,00	Terjadi peningkatan sebesar 4,00%

- Analisis pencapaian pada indikator kinerja Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terjadi stagnan atau dapat dipertahankan yaitu diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak tahun 2018 s.d. 2020. Hal ini disebabkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi telah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan/ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan Opini WTP ini adalah, antara lain : Diterapkannya kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan

oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adanya perbaikan atas penatausahaan persediaan, perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, sertifikasi tanah dan pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua serta terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

- Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik baru dilaksanakan pada tahun 2019-2020 hal ini dilakukan dalam rangka penilaian terhadap kinerja perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan yang berisiko tinggi berdasarkan identifikasi risiko yang dibuat. Sejak tahun 2019 s.d, 2020 ini belum ada perangkat daerah yang berkinerja baik/tinggi, karena penilaian kinerja yang dilakukan pada Perangkat Daerah berdasarkan hasil Audit Kinerja yang sesuai dengan 3 E (efisien, efektif dan ekonomis) terhadap program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Capaian program dan Kegiatan Perangkat Daerah terjadi peningkatan 1,04%, hal ini disebabkan karena tingginya daya serap anggaran yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Operasional yang dilaksanakan terhadap perangkat daerah di sisi lain serapan yang tinggi ini juga disebabkan adanya pemotongan / refocusing anggaran sebesar 50% pada setiap perangkat daerah. Diharapkan untuk maksimalnya penyerpaan anggaran yang tertuang dalam Program dan Kegiatan agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meningkat monev melalui Aplikasi TEPRA, melaksanakan rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA.
- Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2018 s.d. 2020 berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi

Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.

- Analisis Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq B$ sejak tahun 2019 s.d. 2020 pencapaiannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 19 di tahun 2017, 25 di tahun 2018 dan 28 di tahun 2019, dan 29 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan berbagai upaya-upaya diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.
- Analisis terhadap Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sejak tahun 2019 s. d. 2020 mengalami peningkatan dalam tingkat penyelesaiannya terhadap rekomendasi / saran yang disampaikan dalam hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, hal ini disebabkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil

Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2020
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)-1*100
a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	8	6	Terjadi penurunan sebesar 25%
b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	Kab/Kota	3	4	6	Terjadi peningkatan sebesar 50%

- Analisis terhadap Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari tahun 2018 s.d. 2020 mengalami peningkatan, yaitu dari 5 Kab/Kota di tahun 2017 dan 2018 meningkat 8 Kab/Kota di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 6 Kab/Kota pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya perubahan kriteria /standar/ template penilaian/evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka meningkat kinerja pemda Kab/Kota diperlukan adanya komitmen dari Kepala Daerah pada Pemda Kab Kab/Kota tersebut dan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK), meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Kementerian Dalam Negeri serta Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

- Analisis terhadap pencapaian Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B sejak tahun 2019 s.d. 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 6 Kab/Kota dengan katagori B, hal ini didasarkan atas hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota pada 10 Pemda Kab/Kota melalui zoom meeting/ virtual dengan Pemda Kab/Kota. Terhadap capaian ini diharapkan pada tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rencana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2020
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)-1*100
a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	100	100	Stagnan tidak terjadi peningkatan/ penurunan
b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	%	- -	77,46 61,32	97,84 72,59	Terjadi peningkatan LHKPN sebesar 26,31% dan LHKASN sebesar 18,38%.
c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	-	27	4	Terjadi penurunan sebesar 85,19%
d.	Hasil Survey Penilaian	Nilai	67,55	0	66,76	Terjadi

	Integritas Pemda					peningkatan sebesar 66,76%. Angka ini mengacu pada Laporan Tahun 2019 karena Laporan Hasil 2019 baru disampaikan pada tahun 2020.
e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	0	1	Terjadi Peningkatan 100%
f.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	-	-	24,36	Evaluasi RB PD baru dilaksanakan pada Tahun 2020 dengan capai 24,36

- Analisis terhadap pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani sejak tahun 2019 s.d. 2020 menunjukkan peningkatan dan tercapai 100%. Hal ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan SDM Aparatur Pengawasan serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.
- Analisis terhadap pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN sejak tahun 2018 s.d. 2020. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 hal ini dilakukan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemprov Kaltim Tahun 2019 s.d. 2023. Pencapaian di tahun 2020 dengan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar

97,84% dan kepatuhan penyampaian LHKASN sebesar 72,59% Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan meningkatnya kesadaran oleh ASN atas penyampaian Laporan Harta Kekayaannya. Namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

- Analisis terhadap pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi sejak tahun 2019 s.d 2020, hal ini baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020, dimana pada tahun 2019 penyampaian pelaporan penerimaan gratifikasi melalui UPG sebanyak 27 laporan, sedangkan pada tahun 2020 hanya 4 laporan yang disampaikan ke UPG. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi belum maksimal, meskipun belum semua penerimaan/penolakan gratifikasi ini melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi maupun ke Unit Gratifikasi KPK-RI. Namun dari capaian ini telah menunjukkan adanya kesadaran dari penerima untuk melaporkan penerimaan gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi, pembentukan UPG dan diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sekarang ini yang baru ada UPG pada perangkat daerah baru 3, yaitu di BPSDM, RSJD Atma Husada Mahakam dan RSUD Kanujoso Balikpapan.
- Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak tahun 2019 telah dicapai dengan nilai 66,67 dan pada tahun 2020 kegiatan survey penilaian integritas pemda ini tidak dilaksanakan dikarenakan adanya

pendemi Covid-19 sesuai dengan Surat KPK-RI dan BPS, maka pada tahun 2020 ini pencapaian angka/skor SPI mengacu tahun 2019, karena laporan hasil survey penilaian integritas tahun 2019 baru disampaikan oleh KPK-RI pada tahun 2020 ini.

- Analisis terhadap Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM sejak tahun 2019 s.d. 2020 hal ini sudah dibangun dengan menetapkan pilot project ZI menuju WBK/WBBM kepada perangkat daerah yang bersifat pelayanan, dan ditahun 2018 telah ditetapkan Perangkat Daerah RSUD Kanujoso Balikpapan sebagai ZI Menuju WBK dan pada tahun 2019 ini kembali diusulkan RSUD Kanujoso Balikpapan untuk ZI menuju WBBM dan pada tahun 2020 ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada RSUD AW. Syahrani. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, bahwa hasil evaluasi belum memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Birokrasi dari Korupsi).
- Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,36 nilai atau dengan capai 67,11%, hal ini belum tercapai terhadap target yang ditetapkan sebesar 36,30 nilai. Penilaian dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Bappeda, BKD, Disperindagkop, RSUD AWS, RSUD Kanujoso dan RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap aspek pengungkit dan reform, dari hasil penilaian diperoleh angka rata-rata nilai reformasi birokrasi atas 10 PD tersebut mencapai 24,46 nilai. Hasil rekomendasi penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Asesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k). Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan,

SPI, dan ZI (I). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya – upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2020
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)/5*100
a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	2	3	Terjadi peningkatan 50%
b.	Tenaga Fungsional yang Pengawasan bersertifikat	Orang	36	44	46	Terjadi peningkatan sebesar 9,53%

- Analisis terhadap Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat sejak tahun 2018 s.d. 2020 sudah dilakukan penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan level 3, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan dimana hasil evaluasi dari 6 (enam) elemen penilaian, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola. 3 (tiga) elemen berada pada Level 2, yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Praktik Profesional dan 3 (tiga) elemen berada pada Level 3, yaitu Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola. Dari penilaian keseluruhan berada pada Level 3. Pada tahun 2020 upaya-upaya mempertahankan capaian pada level 3 telah dilaksanakan, antara lain dengan melaksanakan dan mengikutsertakan SDM / Auditornya pada kegiatan Diklat Audit Kinerja dan telah dibuatkan Pedoman Dalam melakukan Audit Kinerja, perencanaan profesional setiap SDM/Auditor sudah dibuat dari mulai perencanaan diklat, kebutuhan diklat dan diklat-diklat

yang pernah diikuti oleh SDM/Auditor sudah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan mengikutsertakan SDM/Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Diklat Manajemen Risiko baik yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Pihak Ketiga (Swasta) dan Perencanaan yang dibuat sudah berbasis risiko dengan membuat pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Yang Berbasis. Selanjut terhadap perangkat daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan identifikasi risiko sampai pada tingkat rencana tindak lanjutnya. Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan Penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian.

- Analisis terhadap Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat sejak tahun 2018 s.d. 2020, hal ini sudah dilaksanakan dan mengalami peningkatan dari 39 orang tahun 2017, 36 orang tahun 2018 terjadi penurunan disebabkan adanya yang pensiun dan tahun 2019 sebanyak 44 orang dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 46 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi dan mengikutserta SDM Aparatur Pengawasan pada Diklat dan Ujian Sertifikasi Auditor.

3. Membandingkan Realiasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (RPJMD/Renstra).

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan terget jangka menengah yang

sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang juga dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, bahwa pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terdapat Indikator yang harus dicapai dalam Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ada 2 indikator sesuai dengan misi 5 dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, yaitu :

- a. Level Maturitas SPIP Pemda.
- b. Hasil Survey Penilaian Integritas

Perbandingan pencapaian terhadap 2 indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra (2023)	Realisasi (Tahun 2020)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	4	3	Sejak Tahun 2018 – 2020 Terjadi peningkatan capaian yaitu pada level 3.
2.	Hasil Survey Penilaian Integritas	Nlai	75	66,67	Sejak tahun 2018-2020 Pencapaian mengalami peningkatan, angka pencapaian ini didasarkan pada hasil SPI tahun 2019, karena laporan hasil SPI baru disampaikan oleh KPK-RI

					pada tahun 2020.
--	--	--	--	--	------------------

- Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2019 s.d. 2020 berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2020 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.
- Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak tahun 2018 telah dicapai dengan nilai 67,55 dan pada tahun 2019 hasil laporan SPI belum diterima dan pada tahun 2020 ini kegiatan Survey Penilaian Integrotas (SPI) tidak dilaksanakan sesuai dengan surat KPK-RI dan BPS dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Dengan demikian hasil pencapaian tahun 2020 ini mengacu pada pencapaian tahun 2019 sebesar 66,67 skor. Hal dikarenakan Laporan hasil SPI tahun 2019 baru diterima pada tahun 2020. Kalau dilihat dari tahun ke tahun pencapaian nilai SPI bervariasi. Untuk meningkatkan integritas di Pemda Prov. Kaltim berdasarkan hasil SPI tersebut, KPK merekomendasikan beberapa upaya sebagai berikut : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini

dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada tahun 2019 s.d. 2020 target kinerja yang menjadi target Standar Nasional adalah 2 target kinerja yaitu Maturitas SPIP Pemda dan Kapabilitas APIP, hal ini sesuai pencaangan yang dilakukan oleh Presiden RI bahwa Maturitas SPIP Pemda dan Kapabilitas APIP secara Nasional harus berada di level 3. Terhadap 2 indikator kinerja ini sudah dicapai pada tahun 2019 – 2020 pada level 3.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6 (5/4)*100
a.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	3	3	100
b.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah dan Akan Dilakukan

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 17 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau terjadi peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan sebagaimana uraian berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2020
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5-1) *100
a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	WTP	WTP	WTP	Capai atas Opini WTP dapat dipertahankan.
b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	%	-	0	0	Target tidak tercapai, karena hasil Audit Kinerja terhadap perangkat daerah masih berada pada tingkat Sedang.
c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	96,82	95,39	96,38	Terjadi peningkatan pencapaian sebesar 1,04%
d.	Level Maturitas SPIP Pemda	Level	2	3	3	Capaian pada level 3 dapat dipertahankan.
e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq B	PD	25	28	29	Terjadi peningkatan sebesar 3,58%
f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	82	80	81	Terjadi peningkatan sebesar 1,25%
g.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	%	-	62,50	65,00	Terjadi peningkatan sebesar 4,00%

- Analisis pencapaian pada indikator kinerja Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terjadi stagnan atau dapat dipertahankan yaitu diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak tahun 2018 s.d. 2020. Hal ini disebabkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi telah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan/ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Upaya-upaya / solusi yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan Opini WTP ini adalah, antara lain : Diterapkannya kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adanya perbaikan atas penatausahaan persediaan, perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, sertifikasi tanah dan pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua serta terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

- Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik baru dilaksanakan pada tahun 2019-2020 hal ini dilakukan dalam rangka penilaian terhadap kinerja perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan yang berisiko tinggi berdasarkan identifikasi risiko yang dibuat. Sejak tahun 2019 s.d. 2020 ini belum ada perangkat daerah yang berkinerja baik/tinggi, hasil audit menunjukkan kinerja perangkat daerah masih berada pada kisaran sedang.

Hal ini disebabkan antara lain penilaian kinerja untuk masing-masing kegiatan atas penilaian aspek kinerja (yang meliputi Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Perencanaan Indikator Kinerja dan Penganggaran, Pengujian Substantif atas Capaian IKU, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan) dan Audit Kinerja yang sesuai dengan 3 E (efisien, efektif dan ekonomis) terhadap program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat

Daerah hasil yang dicapai belum sesuai dengan bobot/standar yang dipersyaratkan sesuai dalam Pedoman Audit Kinerja.

Upaya-upaya / solusi agar penilaian kinerja perangkat daerah bernilai baik, antara lain adalah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya, kemungkinan terlalu tinggi bobot/standar yang dipersyaratkan, sehingga sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, dan selanjutnya perlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Capaian program dan Kegiatan Perangkat Daerah terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan karena tingginya daya serap anggaran yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang sesuai dengan hasil Pemeriksaan Operasional yang dilaksanakan terhadap perangkat daerah di sisi lain serapan yang tinggi ini juga disebabkan adanya pemotongan / refocusing anggaran sebesar 50% pada setiap perangkat daerah.

Upaya – upaya / solusi yang harus dilakukan antara lain dalam rangka mempertahankan/meningkatkan capaian ini adalah untuk maksimalnya penyerapan anggaran yang tertuang dalam Program dan Kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, meningkat monev melalui Aplikasi TEPPRA, melaksanakan rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA setiap 3 bulan sekali.

- Analisis pencapaian Level Maturitas SPIP Pemda, sejak tahun 2018 s.d. 2020 berada pada Level 3, penilaian telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2019 s.d. 2020 pada level 3.

Pencapaian level 3 ini didasarkan pada hasil penilaian yang menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6)

dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi.

Upaya-upaya atau solusi yang dilaksanakan dalam rangka mempertahankan Maturitas SPIP Pemda pada Level 3, antara lain melakukan pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi yang didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian dapat segera teridentifikasi.

- Analisis Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori $\geq B$ sejak tahun 2019 s.d. 2020 pencapaiannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu 19 di tahun 2017, 25 di tahun 2018 dan 28 di tahun 2019, dan 29 pada tahun 2020.

Hal ini disebabkan berbagai upaya-upaya atau solusi yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak/berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya perangkat daerah dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

- Analisis terhadap Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sejak tahun 2019 s. d. 2020 mengalami peningkatan dalam tingkat penyelesaiannya terhadap rekomendasi / saran yang disampaikan dalam hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Hal ini disebabkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2020
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)-1*100
a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	8	6	Terjadi penurunan sebesar 25%
b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	Kab/Kota	3	4	6	Terjadi peningkatan sebesar 50%

- Analisis terhadap Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari tahun 2018 s.d. 2020 mengalami peningkatan, yaitu dari 5 Kab/Kota di tahun 2017 dan 2018 meningkat 8 Kab/Kota di tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 6 Kab/Kota pada Tahun 2020.

Hal ini disebabkan adanya perubahan kreteria /standar/ template penilaian/evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Upaya-upaya atau solusi yang dilaksanakan dalam rangka meningkat kinerja pemda Kab/Kota diperlukan adanya komitmen dari Kepala Daerah pada Pemda Kab Kab/Kota tersebut dan data pendukung yang disampaikan oleh

Pemerintah Kab/Kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK), meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Kementerian Dalam Negeri serta Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

- Analisis terhadap pencapaian Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B sejak tahun 2019 s.d. 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2020 sebanyak 6 Kab/Kota dengan katagori B, hal ini didasarkan atas hasil Evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB.

Upaya-upaya atau solusi yang dilaksanakan dalam rangka meningkat capaian kinerja ini adalah antara lain membuat dan menetapkan rancana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2020
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)-1*100
a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	100	100	Stagnan tidak terjadi peningkatan/ penurunan
b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	%	- -	77,46 61,32	97,84 72,59	Terjadi peningkatan LHKPN sebesar 26,31% dan LHKASN sebesar 18,38%.
c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	-	27	4	Terjadi penurunan sebesar 85,19%

d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	67,55	0	66,76	Terjadi peningkatan sebesar 66,76%. Angka ini mengacu pada Laporan Tahun 2019 karena Laporan Hasil 2019 baru disampaikan pada tahun 2020.
e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	0	1	Terjadi Peningkatan 100%
f.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	-	-	24,36	Evaluasi RB PD baru dilaksanakan pada Tahun 2020 dengan capai 24,36

- Analisis terhadap pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani sejak tahun 2019 s.d. 2020 menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan adanya dukungan anggaran dan SDM Aparatur Pengawasan serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.
- Analisis terhadap pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN sejak tahun 2019 s.d. 2020. Kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020. Dari hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya peningkatan dalam kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan baik LHKPN dan LHKASN Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran ASN atas penyampaian Laporan Harta Kekayaannya.

Upaya – upaya atau solusi dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan tersebut antara lain yang dilakukan

adalah selalu mengingatkan kepada ASN atas kewajibannya menyampaikan LHKPN dan LHKASN dan adanya pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

- Analisis terhadap pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi sejak tahun 2019 s.d 2020, hal ini baru dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020, dimana pada tahun 2019 penyampaian pelaporan penerimaan gratifikasi melalui UPG sebanyak 27 laporan, sedangkan pada tahun 2020 hanya 4 laporan yang disampaikan ke UPG. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi belum maksimal dan terjadi penurunan.

Upaya – upaya atau solusi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja ini antara lain adalah mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi, pembentukan UPG dan diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi, dimana sampai tahun 2020 baru ada UPG pada perangkat daerah baru 3, yaitu di BPSDM, RSJD Atma Husada Mahakam dan RSUD Kanujoso Balikpapan.

- Analisis terhadap Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda sejak tahun 2019 s.d. 2020 telah dicapai dengan nilai 66,67.

Upaya – upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini adalah antara lain : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang

diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

- Analisis terhadap Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM sejak tahun 2019 s.d. 2020 hal ini sudah dibangun dengan menetapkan pilot project ZI menuju WBK/WBBM kepada perangkat daerah yang bersifat pelayanan.

Upaya – upaya yang dilakukan antara lain kepada perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM untuk berkometmen serta kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi standar/bobot penilaian ZI sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga penetapan ZI menuju WBK/WBBM dapat tercapai.

- Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,36 nilai atau 67,11%, hal ini belum tercapai terhadap target yang ditetapkan sebesar 36,30 nilai.

Upaya – upaya atau solusi yang dilakukan agar tercapai adalah adanya komitmen dan kesadaran perangkat daerah untuk memenuhi bobot/standar

penilaian antara lain memenuhi dokumen penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Assesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k). Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPI, dan ZI (l). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya – upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2020
			2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)/5*100
a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level	2	2	3	Terjadi peningkatan 50%
b.	Tenaga Fungsional yang Pengawasan bersertifikat	Orang	36	44	46	Terjadi peningkatan sebesar 9,53%

- Analisis terhadap Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat sejak tahun 2018 s.d. 2020 sudah dilakukan penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dengan level 3.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian pada level 3, antara lain dengan melaksanakan dan mengikutsertakan SDM / Auditornya pada kegiatan Diklat Audit Kinerja dan telah dibuatkan Pedoman Dalam

melakukan Audit Kinerja, perencanaan profesional setiap SDM/Auditor sudah dibuat dari mulai perencanaan diklat, kebutuhan diklat dan diklat-diklat yang pernah diikuti oleh SDM/Auditor sudah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan mengikutsertakan SDM/Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Diklat Manajemen Risiko baik yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Pihak Ketiga (Swasta) dan Perencanaan yang dibuat sudah berbasis risiko dengan membuat pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Yang Berbasis. Selanjut terhadap perangkat daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan identifikasi risiko sampai pada tingkat rencana tindak lanjutnya. Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan Penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dan sampai dengan saat ini masih dalam proses penilaian.

- Analisis terhadap Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat sejak tahun 2018 s.d. 2020, hal ini sudah dilaksanakan dan mengalami peningkatan dari 39 orang tahun 2017, 36 orang ditahun 2018 terjadi penurunan disebabkan adanya yang pensiun dan ditahun 2019 sebanyak 44 orang dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 46 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
- Upaya upaya atau solusi yang sudah dilaksanakan adalah adanya penerimaan dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi dan mengikutserta SDM Aparatur Pengawasan pada Diklat dan Ujian Sertifikasi Auditor.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau dibawah 100% atau ketercapaiannya 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi. Input yang dimiliki dalam hal adalah anggaran dan SDM Aparatur Pengawasan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3		4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	100	99,99	0,01
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	0	94,18	-94,18 Capain Nol, karena tidak ada PD yang berkinerja baik, hasil audit pada katagori sedang
		c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	104,72	99,35	5,37
		d.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	100	99,47	0,53
		e.	Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	100	99,98	0,02
		f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	88,50	11,50
		g.	Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ditangani	76,47	88,50	-12,03
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	100	99,92	0,08
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori " B "	100	99,68	0,32
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	99,32	0,68

		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :			
			LHKPN	97,84	100	-2,16
			LHKASN	73,59	100	-26,41
		c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20	0,00	20 Anggaran di refocusing Covid-19
		d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	95,38	0,00	95,38 Anggaran di refocusing Covid-19
		f.	Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai pilot project ZI Menuju WBK/WBBM	100	58,02	41,98
		g.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	67,11	98,67	-31,56
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	a.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang Bersertifikat	83,64	89,16	-5,52
		b.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	100	99,47	0,53

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian penjanjian/penetapan kinerja tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

- a. Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,99 %. Keberhasilan pencapaian opini atas laporan keuangan Pemda dengan opini WTP telah didukung dengan Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan/Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 147.1085.000,00 dengan serapan sebesar Rp. 147.089.000,00 (99,99%). Keberhasilan capaian kinerja 100% ini menunjukkan adanya kesesuaian dukungan program/kegiatan yang telah diserapkan 99,99% dan hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

- b. Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 0 (nol) perangkat daerah dengan capaian 0%. Terhadap target kinerja ini memang belum tercapai, meskipun telah didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal/Kegiatan Pemeriksaan Kinerja OPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.164.125.000,00 dan realisasi / serapan sebesar Rp.154.577.500,00 (94,18%). Hal ini perbandingan terbalik dengan capaian kinerja yang Nol persen (0%) dengan realisasi anggaran sebesar 94,18% sehingga terjadi in efisiensi, hal disebabkan karena dari hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan pada perangkat daerah tersebut target berkinerja baik belum tercapai karena masih dalam katagori sedang.
- c. Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 92 % dan telah dicapai sebesar 96,38 % dengan capaian sebesar 104,72%. Dukungan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal/Kegiatan Pemeriksaan Operasional OPD dengan anggaran sebesar Rp.480.025.000,00 dan telah terealisasi/diserap sebesar Rp.447.082.500,00 (99,35%). Keberhasilan pencapaian kinerja ini telah didukung dengan program/kegiatan yang tepat, dimana capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan, dan dibandingkan dengan serapan tersebut terjadi efisiensi anggaran.
- d. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2020 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 yang didukung dengan Program Peningkatan Kapabilitas APIP/Kegiatan Peningkatan Level Kapabilitas APIP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.047.800,00 dengan realisasi Rp. 190.037.800,00 (99,47%), bila dibandingkan dengan dukungan anggaran yang telah diserap sebesar 99,47 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi terhadap anggaran yang telah digunakan dalam mendukung capaian target kinerja tersebut.
- e. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B pada tahun 2020 ditarget sebanyak 29 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29

perangkat dengan capaian 100%. Pencapaian ini sesuai target yang telah ditetapkan ini didukung dengan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja / Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.169.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 169.178.500,00 (99,98%). Bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan terhadap pencapaian kinerja menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

- f. Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 80% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar 101,25%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini telah sesuai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal / Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.249.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.221.115.000,00 (88,50%), hal ini bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja dan dukungan program/kegiatan yang ada terjadi efisiensi anggaran.
- g. Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 65 % dengan capaian 76,47%. Pencapaian kinerja didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal/Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.249.850.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.221.118.000,00 (88,50%). Bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan terhadap pencapaian kinerja, maka terjadi in efisiensi anggaran.
- h. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota/ Kegiatan Evaluasi EKPPD Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp.669.766.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.669.252.500,00 (99,92%). Bila dibandingkan

dengan pencapaian kinerja dengan dukungan program/kegiatan terjadi efisiensi anggaran.

- i. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota/ Kegiatan Evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.320.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp.319.685.650,00 (99,68%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.
- j. Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN/Kegiatan Pemeriksaan Khusus/Investigatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.237.945.000,00 dan realisasi sebesar Rp.236.322.831,00 (99,32%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka telah terjadi efisiensi anggaran.
- k. Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 65% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 97,84% dengan capaian 136,13% dan penyampaian LHKASN sebesar 75,89% dengan capaian 113,23%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN/Kegiatan Monev LHKPN dan LHKASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.324.100,00 dan realisasi sebesar Rp.49.324.100,00 (100%). Pencapaian kinerja ini dibandingkan dengan dukungan Program/Kegiatan tersebut terjadi efisiensi anggaran.

- l. Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 20 laporan dan telah dicapai 4 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 20%, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendah. Pencapaian ini didukung dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN/Kegiatan Pengendalian Gratifikasi, dikarenakan adanya refocusing anggaran maka anggaran untuk kegiatan pengendalian gratifikasi ditiadakan/dihilangkan.
- m. Pada tahun 2020 pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) tidak dilaksanakan, meskipun telah didukung dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN/Kegiatan Survei Penilaian Integritas, karena dengan pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat dari KPK dan BPS Pusat, bahwa pelaksanaan SPI tahun 2020 tidak dilaksanakan. Terhadap program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini difocusing dialihkan ke prog/kegiatan lainnya. Hasil survei penilaian integritas yang ditampilkan adalah hasil capaian tahun 2019.
- n. Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah, dengan capaian 100%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Pemberantasan dan Pengendalian KKN/Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.685.000,00 dan realisasi sebesar Rp.52.030.900,00 (58,02%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.
- o. Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,36 nilai atau dengan capaian 67,11%, pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 36,30 nilai. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal/Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp.43.095.000,00 (98,67%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut terjadi in efisiensi anggaran.

- p. Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Peningkatan Kapabilitas API/Kegiatan Peningkatan Level Kapabilitas APIP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.047.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 190.037.800,00 (99,47%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.
- q. Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Peningkatan Kapabilitas APIP/Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.795.847.500,00 dan realisasi sebesar Rp.709.581.777,00 (89,16%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dukungan program/kegiatan, maka terjadi in efisiensi anggaran.

E. REALISASI ANGGARAN

Dalam sub ini akan menguraikan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	WTP	100	147.105.000	147.089.800	99,99
b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	0	0	164.125.000	154.577.500	94,18

c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	92	96,39	104,72	450.025.000	447.082.500	99,35
d.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	3	100	191.047.800	190.037.800	99,47
e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	29	100	169.210.000	169.176.500	99,98
f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	81	101,25	249.850.000	221.115.000	88,50
g.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	85	65	76,47	249.850.000	221.115.000	88,50

- a. Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 99,99 %. Keberhasilan pencapaian opini atas laporan keuangan Pemda dengan opini WTP telah didukung dengan Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan/Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 147.1085.000,00 dengan serapan sebesar Rp. 147.089.000,00 (99,99%). Keberhasilan capaian kinerja 100% ini menunjukkan adanya kesesuaian dukungan program/kegiatan yang telah diserapkan 99,99% dan hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran.
- b. Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 0 (nol) perangkat daerah dengan capaian 0%. Terhadap target kinerja ini memang belum tercapai, meskipun telah didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal/Kegiatan Pemeriksaan Kinerja OPD dengan dukungan anggaran sebesar Rp.164.125.000,00 dan realisasi / serapan sebesar Rp.154.577.500,00 (94,18%). Hal ini perbandingan terbalik dengan capaian

kinerja yang Nol persen (0%) dengan realisasi anggaran sebesar 94,18% sehingga terjadi in efisiensi, hal disebabkan karena dari hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan pada perangkat daerah tersebut target berkinerja baik belum tercapai karena masih dalam katagori sedang.

- c. Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2020 ditergetkan sebesar 92 % dan telah dicapai sebesar 96,38 % dengan capaian sebesar 104,72%. Dukungan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal/Kegiatan Pemeriksaan Operasional OPD dengan anggaran sebesar Rp.480.025.000,00 dan telah terealisasi/diserap sebesar Rp.447.082.500,00 (99,35%). Keberhasilan pencapaian kinerja ini telah didukung dengan program/kegiatan yang tepat, dimana capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan, dan dibandingkan dengan serapan tersebut terjadi efisiensi anggaran.
- d. Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2020 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 yang didukung dengan Program Peningkatan Kapabilitas APIP/Kegiatan Peningkatan Level Kapabilitas APIP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.047.800,00 dengan realisasi Rp. 190.037.800,00 (99,47%), bila dibandingkan dengan dukungan anggaran yang telah diserap sebesar 99,47 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi terhadap anggaran yang telah digunakan dalam mendukung capaian target kinerja tersebut.
- e. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B pada tahun 2020 ditarget sebanyak 29 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat dengan capaian 100%. Pencapaian ini sesuai target yang yang telah ditetapkan ini didukung dengan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja / Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.169.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 169.178.500,00 (99,98%). Bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan terhadap pencapaian kinerja menunjukkan adanya efisiensi anggaran.

- f. Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 80% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar 101,25%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini telah sesuai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal / Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.249.850.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.221.115.000,00 (88,50%), hal ini bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja dan dukungan program/kegiatan yang ada terjadi efisiensi anggaran.
- g. Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 65 % dengan capaian 76,47%. Pencapaian kinerja didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal/Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.249.850.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.221.118.000,00 (88,50%). Bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan terhadap pencapaian kinerja, maka terjadi in efisiensi anggaran.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	6	6	100	669.760.000	669.282.500	99,92
b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	6	6	100	320.710.000	319.685.650	99,68

- a. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota/ Kegiatan Evaluasi EKPPD Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp.669.766.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.669.252.500,00 (99,92%). Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja dengan dukungan program/kegiatan terjadi efisiensi anggaran.
- b. Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota/ Kegiatan Evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.320.710.000,00 dan realisasi sebesar Rp.319.685.650,00 (99,68%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	100	100	237.945.000	236.322.631	99,32
b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	65 65	97,84 73,59	136,13 113,32	49.324.100	49.324.100	100

c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20	4	20,00	0	0	0 Refocusing Anggaran
d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	70	66,76	95,38	0	0	0 Tidak dilaksanakan karena Pandemi Covid-19
e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1	1	100	89.685.000	52.030.900	58,02
f.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30	24,36	67,11	43.675.000	43.095.000	98,67

- a. Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN/Kegiatan Pemeriksaan Khusus/Investigatif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.237.945.000,00 dan realisasi sebesar Rp.236.322.831,00 (99,32%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka telah terjadi efisiensi anggaran.
- b. Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 65% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 97,84% dengan capaian 136,13% dan penyampaian LHKASN sebesar 75,89% dengan capaian 113,23%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN/Kegiatan Monev LHKPN dan LHKASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.324.100,00 dan realisasi sebesar Rp.49.324.100,00 (100%). Pencapaian kinerja ini dibandingkan dengan dukungan Program/Kegiatan tersebut terjadi efisiensi anggaran.

- c. Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 20 laporan dan telah dicapai 4 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 20%, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendah. Pencapaian ini didukung dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN/Kegiatan Pengendalian Gratifikasi, dikarenakan adanya refocusing anggaran maka anggaran untuk kegiatan pengendalian gratifikasi ditiadakan/dihilangkan.
- d. Pada tahun 2020 pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) tidak dilaksanakan, meskipun telah didukung dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN/Kegiatan Survei Penilaian Integritas, karena dengan pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat dari KPK dan BPS Pusat, bahwa pelaksanaan SPI tahun 2020 tidak dilaksanakan. Terhadap program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini difocusing dialihkan ke prog/kegiatan lainnya. Hasil survei penilaian integritas yang ditampilkan adalah hasil capaian tahun 2019.
- e. Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah, dengan capaian 100%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Pemberantasan dan Pengendalian KKN/Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.685.000,00 dan realisasi sebesar Rp.52.030.900,00 (58,02%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.
- f. Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,36 nilai atau dengan capaian 67,11%, pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 36,30 nilai. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal/Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.675.000,00 dan realisasi sebesar Rp.43.095.000,00 (98,67%). Pencapaian kinerja ini bila dibanding dengan dukungan program/kegiatan tersebut terjadi in efisiensi anggaran.

Sasaran 4 : Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	3	100	191.047.800	190.037.800	99,47
b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55	46	83,64	795.847.500	709.581.777	89,16

- a. Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Peningkatan Kapabilitas API/Kegiatan Peningkatan Level Kapabilitas APIP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.047.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 190.037.800,00 (99,47%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dengan dukungan program/kegiatan tersebut, maka terjadi efisiensi anggaran.
- b. Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja ini didukung dengan Program Peningkatan Kapabilitas APIP/Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.795.847.500,00 dan realisasi sebesar Rp.709.581.777,00 (89,16%). Pencapaian kinerja ini bila dibandingkan dukungan program/kegiatan, maka terjadi in efisiensi anggaran.

2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2020 untuk menunjang program dan kegiatan pengawasan serta kegiatan penunjang lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp.

24.377.419.592,50 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.987.957.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.900.758.129,00 (83,92%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.389.462.592,50 dengan realisasi sebesar Rp. 10.973.554.586,00 (96,35%). Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran masing –masing Program dan Kegiatan tahun 2020 setelah perubahan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Ket. Fisik
		Target / Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Tidak Langsung	11.389.462.592,50	10.973.554.586	96,35	Fisik 100%
1.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.745.268.872,50	1.655.914.278	94,88	Fisik 100%
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.745.268.872,50	1.655.914.278	94,88	Fisik 100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.771.772.300	1.732.363.335	97,78	Fisik 100%
a.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1.547.072.300	1.536.009.575	99,28	Fisik 100%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	224.700.000	196.353.760	87,38	Fisik 100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.106.955.600	1.016.899.430	91,86	Fisik 100%
a.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	373.939.900	300.046.930	80,24	Fisik 100%
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	733.015.700	716.852.500	97,79	Fisik 100%
4.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	126.975.000	125.842.800	99,11	Fisik 100%
a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	126.975.000	125.842.800	99,11	Fisik 100%
5.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	1.298.543.100	1.206.056.377	92,88	Fisik 100%
a.	Pelatihan di Kantor Sendiri	120.600.000	116.399.000	96,52	Fisik 100%
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	795.847.500	709.581.777	89,16	Fisik 100%
c.	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	382.095.600	380.075.600	99,47	Fisik 100%

6.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	147.105.000	147.089.800	99,99	Fisik 100%
a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	147.105.000	147.089.800	99,99	Fisik 100%
7.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	169.210.000	169.176.500	99,98	Fisik 100%
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	169.210.000	169.176.500	99,98	Fisik 100%
8.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	2.727.880.000	2.681.400.137	98,30	Fisik 100%
a.	Pemeriksaan Operasional OPD	450.025.000	447.082.500	99,35	Fisik 100%
b.	Pemeriksaan Kinerja OPD	164.125.000	154.577.500	94,18	Fisik 100%
c.	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	344.100.000	343.954.737	99,96	Fisik 100%
d.	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	1.435.605.000	1.433.755.400	99,87	Fisik 100%
e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	249.850.000	221.115.000	88,50	Fisik 100%
f.	Pemberian Advis dan Konsultasi	40.500.000	37.820.000	93,38	Fisik 100%
g.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	43.675.000	43.095.000	98,67	Fisik 100%
9.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	1.146.848.620	1.144.656.650	99,81	Fisik 100%
a.	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	669.766.000	669.252.500	99,92	Fisik 100%
b.	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	320.710.000	319.685.650	99,68	Fisik 100%
c.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	156.372.620	155.718.500	99,58	Fisik 100%
10.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1.148.904.100	1.094.155.279	95,23	Fisik 100%
a.	Pemeriksaan Khusus/ Investigasi	237.945.000	236.322.831	99,32	Fisik 100%
b.	Pembangunan Zona Integritas	89.685.000	52.030.900	58,02	Fisik 100%
c.	Pencegahan Korupsi	34.700.000	34.653.500	99,87	Fisik 100%
d.	Pengendalian Gratifikasi	0	0	0	Refocusing
e.	Pengendalian Whistle Blowing System (WBS) dan Benturan Kepentingan	0	0	0	Refocusing
f.	Monev LHKPN dan LHKASN	49.324.100	49.324.100	100	Fisik 100%
g.	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4-D), APIP dan APH	211.500.000	211.184.900	99,85	Fisik 100%
h.	Operasional SABERPUNGLI	525.750.000	510.639.048	97,13	Fisik

					100%
i.	Survei Penilaian Integritas	0	0	0	Refocusing
j.	Pembangunan Budaya Integritas	0	0	0	Refocusing

Pada tahun anggaran 2020, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung tugas – tugas dibidang pengawasan telah menetapkan 10 Program dengan 31 Kegiatan. Dari 10 Program tersebut, 6 Program Utama/Prioritas dan 4 Program Penunjang dengan alokasi anggaran baik untuk Program Prioritas dan Penunjang sebesar Rp. 11.389.462.592,50 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 10.973.554.586,00 (96,35%). Pada tahun 2020 terhadap anggaran yang dikelola tersebut baik program prioritas dan program penunjang sebesar Rp. 11.389.462.592,50 telah ditetapkan 4 sasaran utama/strategis dengan 17 indikator. Dengan adanya pandemi Covid-19 alokasi anggaran untuk semua perangkat daerah direfocusing sebesar 50%, hal ini mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain : Kegiatan Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Whistle Blowing System (WBS) dan Bentutan Kepentingan, Survei Penilaian Integritas dan Pembangunan Budaya Integritas. Hal ini tentunya juga akan membawa pengaruh terhadap tidak tercapainya beberapa sasaran kinerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Terhadap beberapa indikator yang belum tercapai tersebut akan dilakukan evaluasi dalam rangka perbaikan pencapaian kedepan.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2020 yang berisikan capaian dan hambatan-hambatan dalam pencapaiannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020, yaitu terdapat 4 sasaran dan 17 indikator kinerja yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 4 sasaran dan 17 indikator telah dicapai sebesar **87,02%**.

Secara umum dapat dikemukakan pencapaian kinerja organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dan langkah-langkah di masa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalah sebagai berikut :

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Capaian WTP.

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2020 dengan capaian Opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan efektivitas dalam Sistem

Pengendalian Intern serta Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Diharapkan pada tahun – tahun mendatang pencapaian ini akan terus dipertahankan dengan opini WTP dengan melakukan antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.

2. Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik dengan Capaian 0%.

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 0 (nol) perangkat daerah dengan capaian 0%. Diharapkan pada tahun – tahun mendatang terhadap capaian kinerja ini dapat ditingkatkan dengan melakukan upaya – upaya diantaranya adalah (a). Merumuskan pendelegasian wewenang dan kebijakan mendukung terciptanya akuntabilitas dan pengendalian; (b) Membuat kebijakan atau Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan serta pendokumentasian atas pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang baik salah satunya adalah pedoman yang dibuat kemungkinan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai

untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini diperlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

3. *Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dengan capaian 96,35%*

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 90 % dan telah dicapai sebesar 96,35 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 96,35%. Namun demikian dari capaian tersebut memang telah melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi masih ada beberapa program dan kegiatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini disebabkan belum dilaksanakan secara maksimal dan masih terdapat sisa anggaran, karena keterbatasan waktu dan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan. Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja tersebut perlu dilakukan upaya-upaya antara lain perlunya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, memaksimalkan sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan juga dilaksanakan juga perlunya rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA.

4. *Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim dengan Capaian Level 3*

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2020 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3. Dalam rangka untuk mempertahankan pencapaian level 3 ini perlu adanya upaya-upaya diantaranya melakukan penyelesaian tindak

lanjut atas rekomendasi hasil penilaian, meningkatkan pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008, melakukan penilaian dan evaluasi Maturitas SPIP yang meliputi Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, serta melakukan asistensi dan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka pemenuhan data dukung atas Maturitas SPIP.

5. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori $\geq B$ dengan Capaian 29 Perangkat Daerah

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori \geq pada tahun 2020 ditarget sebanyak 29 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat dengan kategori BB dan B dengan capaian 100%. Dalam rangka untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian kinerja ini kedepan perlu dilakukan upaya-upaya antara lain dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah..

6. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan Capaian 81%.

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 80% dan telah dicapai 81%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP ini perlu dilakukan upaya-upaya antara lain melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP yang lebih pentingnya lagi adanya komitmen dan kesadaran entitas/obrik untuk melaksanakan penyelesaian tindak lanjut serta bila perlu adanya pemberian sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku kepada obrik/entitas yang tidak melaksanakan penyelesaian tindak lanjut.

7. Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani dengan Capaian 65,00%

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti baru mencapai 65,00 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka meningkatkan tindak lanjut penyelesaian pemberian sanksi sesuai dengan hasil rekomendasi hasil pemeriksaan perlu adanya upaya-upaya antara lain meningkatkan kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, diharapkan hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang bersangkutan dan selanjutnya meningkatkan koordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyelesaian surat ketetapan pemberian sanksi ASN.

8. Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD dengan Capaian 6 Kab/Kota.

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian 100%. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota, melakukan asistensi dan pendampingan kepada Pemda Kab/Kota dalam penyusunan LPPD Pemda Kab/Kota dan meningkatkan Sosialisasi/Bimtek/Diklat terkait Penyusunan LPPD Pemda Kab/Kota.

9. Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dengan Capaian 6 Kab/Kota.

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB melalui Zoom Meeting / Vartual. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini perlu adanya upaya-upaya antara lain : meningkatkan komitmen Pemda Kab/Kota, meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, melakukan penyelesaian atas tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya dan melakukan pendampingan atau asistensi dan melaksanakan Bimtek/Diklat terkait Sakip Pemda Kab/Kota.

10. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dengan Capaian 100%.

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat ini telah dilakukan upaya-upaya antara lain adanya dukungan anggaran dan SDM pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk, dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

11. Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKP dan LHKASN dengan Capaian LHKPN, 97,84% dan LHKASN, 73,59%.

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 65% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 97,84% dan penyampaian LHKASN sebesar 73,59%. Pencapaian ini dari tahun ke tahun diharapkan meningkat dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, meningkatkan kesadaran ASN atas kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan sebagaimana yang sudah diwajibkan, namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

12. Jumlah Pelaporan Gratifikasi dengan Capaian 4 Laporan

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 20 laporan dan telah dicapai 4 laporan, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan atas penerimaan gratifikasi adanya penurunan. Dalam rangka meningkat pelaporan gratifikasi ini upaya-upaya yang sudah dilakukan antara lain adanya dukungan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi dan telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPD) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan usaha lain juga diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sekarang ini yang sudah membentuk UPG baru 3 PD yaitu : RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD Kanujoso dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

13. Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda dengan Capaian Nilai 66,76 Nilai/Skor

Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada nilai 70 dengan capaian 66,76 nilai/skor ini berdasarkan Laporan KPK-RI atas Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2019 yang baru diterima hasil pada tahun 2020. Dengan adanya pandemi Covid-19 kegiatan Survei Penilaian Integritas pada tahun 2020 tidak dilaksanakan, hal sesuai dengan surat KPK-RI dan BPS. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya antara lain : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak

pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

14. Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM dengan Capaian 1 (Nol) Perangkat Daerah.

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah adalah pada RSUD AW. Syahrani, namun berdasarkan hasil evaluasi belum layak untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk Zona Integritas WBK. Dalam rangka untuk penetapan ZI WBK/WBBM pada perangkat daerah diperlukan upaya-upaya antara lain melakukan evaluasi, melakukan pendampingan dan asistensi kepada perangkat yang ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM, membuat rencana aksi serta melakukan beberapa perbaikan dan pemenuhan dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi yang telah dilaksanakan.

15. Nilai Refirmasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Capaian 24,36 Nilai/Bobot.

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,36 nilai/bobot atau capaian 67,11%, hal ini menunjukkan belum tercapainya atas target yang ditetapkan yaitu 36,30 nilai/bobot. Dalam rangka pencapaian target Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperlu upaya-upaya antara lain melakukan penilaian dan evaluasi RB Perangkat Daerah, membuat rencana aksi RB OPD, melakukan Sosialisasi / Bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB OPD, dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi

16. Level Kapabilitas APIP Inspektorat dengan Capaian Level 3.

Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai level 3, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja ini perlu dilakukan upaya-upaya antara lain membuat rencana kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya melaksanakan /menindak lanjuti atas rekomendasi yang disampaikan dan melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan.

17. Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dengan Capaian 46 Orang.

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ini sudah dilakukan beberapa upaya antara lain mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan baik yang bersifat fungsional dan substantif, melakukan rekrutmen ASN dari CPNS melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan mutasi antar instansi bagi ASN yang berminat menjadi pejabat fungsional pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat, agar dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 15 Pebruari 2021



INSPEKTUR,

DR. H. M. IRFAN PRANANTA, SE,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740818 199703 1 006

DAFTAR LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP. 733333 – 231 – 202

S A M A R I N D A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Kurniawan, SE, Ak, MM**
Jabatan : Plt. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 Januari 2020

Pihak Kedua,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Pihak Pertama
Irbanwas. Bidang Khusus,

M. Kurniawan, SE, Ak, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19701028 199703 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerknthahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	4
		c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	92
		d.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3
		e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29
		f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80
		g.	Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ditangani	85
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	6
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	6
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100
		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	65 65
		c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20
		d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	70
		e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1
		f.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Rp.	457.450.000,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Rp.	4.957.010.000,00	APBD
3.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp.	443.710.000,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Rp.	2.155.450.000,00	APBD
5.	Program Pencegahan KKN	Rp.	2.948.190.000,00	APBD

No.	Program	Anggaran		Keterangan
6.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Rp.	2.780.100.000,00	APBD

Samarinda, 14 Januari 2020

Gubernur Kalimantan Timur,

Plt. Inspektur
Irbnwas. Bidang Khusus,



Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

M. Kurniawan, SE, Ak, MM

Pembina Tk. I
NIP. 19701028 199703 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP. 733333 – 231 – 202

S A M A R I N D A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM**
Jabatan : Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 14 Januari 2021

Pihak Kedua,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Pihak Pertama,

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19740818 199703 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerknthahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	4
		c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	95
		d.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3
		e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	31
		f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	90
		g.	Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ditangani	85
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	6
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	6
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100
		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	70
				70
		c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20
		d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	75
		e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	f.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30
		a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55

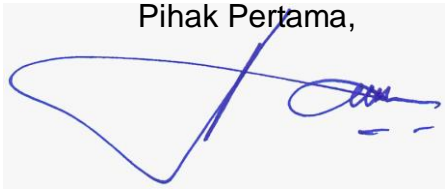
No.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	26.307.481.280,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	10.104.090.400,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp.	2.735.162.320,00	APBD

Samarinda, 14 Januari 2021

Pihak Kedua,

Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si

Pihak Pertama,



Dr. H. M. Irfan Prananta, SE MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19740818 199703 1 006

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Prov. Kaltim
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)		
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	WTP	100
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	0	0
		c.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	3	100
		d.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	28	96,56
		e.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	80	100
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	5	8	160,00
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	5	4	80,00
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	100	100
		b.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	80	62,50	78,13
		c.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	60	77,46	129,00
				60	61,32	102,00
		d.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	15	27	180,00
		e.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	65	0	0
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	2	66,66
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	50	44	88,00

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG KINERJA

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun : 2019

No.	Program	Anggaran		Realisasi	% Capaian
1.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Rp.	3.441.625.000,00	3.437.630.765,00	99,89
2.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	410.100.000,00	381.435.950,00	93,01
3.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp.	1.597.510.000,00	1.596.557.450,00	99,94
4.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp.	189.300.000,00	188.291.300,00	99,47
5.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Rp.	2.322.305.000,00	2.315.367.500,00	99,70
6.	Program Pengembangan Zona Integritas	Rp.	144.900.000,00	142.191.300,00	96,13
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp.	2.767.000.000,00	2.764.634.350,00	99,91
8.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.516.600.000,00	1.419.538.765,00	93,60

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Prov. Kaltim
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)		
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerntahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	WTP	100
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	0	0
		c.	Persentase Capaian Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	92	96,38	104,76
		d.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	3	100
		e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	29	100
		f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	81	101,25
		g.	Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	85	65	76,46
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	6	6	100
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	6	6	1000
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	100	100
		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	65	97,84	136,13
				65	75,89	113,23
		d.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20	4	20,00
		e.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	70	66,76	95,37
		f.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Projcet ZI Menuju WBK/WBBM	1	1	100
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	3	100
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55	46	83,64

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG KINERJA

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun : 2020

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Ket. Fisik
		Target / Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	1.177.943.100	1.089.657.377	92,51	Fisik 100%
a.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	795.847.500	709.581.777	89,16	Fisik 100%
b.	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	382.095.600	380.075.600	99,47	Fisik 100%
2.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	147.105.000	147.089.800	99,99	Fisik 100%
a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	147.105.000	147.089.800	99,99	Fisik 100%
3.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	169.210.000	169.176.500	99,98	Fisik 100%
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	169.210.000	169.176.500	99,98	Fisik 100%
3.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	907.675.500	865.870.000	95,48	Fisik 100%
a.	Pemeriksaan Operasional OPD	450.025.000	447.082.500	99,35	Fisik 100%
b.	Pemeriksaan Kinerja OPD	164.125.000	154.577.500	94,18	Fisik 100%
c.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	249.850.000	221.115.000	88,50	Fisik 100%
e.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	43.675.000	43.095.000	98,67	Fisik 100%
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	990.476.000	988.935.158	99,85	Fisik 100%
a.	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	669.766.000	669.252.500	99,92	Fisik 100%
b.	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	320.710.000	319.685.650	99,68	Fisik 100%
5.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	396.954.100	337.778.831	85,07	Fisik 100%
a.	Pemeriksaan Khusus/ Investigasi	237.945.000	236.322.831	99,32	Fisik 100%
b.	Pembangunan Zona Integritas	89.685.000	52.030.900	58,02	Fisik 100%

c.	Pengendalian Gratifikasi	0	0	0	Refocusing
e.	Monev LHKPN dan LHKASN	49.324.100	49.324.100	100	Fisik 100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2
		c.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3
		d.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29
		e.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	5
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	5
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100
		b.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	80
		c.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	60 60
		d.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	15
		e.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	65
		f.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	50

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Rp.	3.365.125.000,00	APBD
2.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	300.000.000,00	APBD
3.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp.	1.597.500.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp.	189.300.000,00	APBD

5.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Rp.	496.380.000,00	APBD
6.	Program Pengembangan Zona Integritas	Rp.	144.900.000,00	APBD
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp.	2.643.000.000,00	APBD

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerntahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	4
		c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	92
		d.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3
		e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29
		f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80
		g.	Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ditangani	85
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	6
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	6
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100
		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	65 65
		c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20
		d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	70
		e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1
		f.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Rp.	457.450.000,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Rp.	4.957.010.000,00	APBD
3.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp.	443.710.000,00	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Rp.	2.155.450.000,00	APBD
5.	Program Pencegahan KKN	Rp.	2.948.190.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Rp.	2.780.100.000,00	APBD

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerntahan Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	4
		c.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	95
		d.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3
		e.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	31
		f.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	90
		g.	Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ditangani	85
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	6
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	6
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100
		b.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	70 70
		c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20
		d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	75
		e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1
		f.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provisis	Rp.	26.307.481.280,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	10.104.090.400,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	2.735.162.320,00	APBD

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019**

1. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Jabatan : Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
3. Tugas : Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.
3. Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atau Penugasan dari Gubernur.
4. Penyusunan Laporan dari Hasil Pengawasan.
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja “ Tinggi “ sesuai hasil pemeriksaan/Audit	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di	Laporan Hasil Evaluasi BPKP

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
					Pemda Prov. Kaltim	
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	5	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	5	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat
		Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	80	Belum optimalnya tindak lanjut tas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaa di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN	60	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
		LHKASN	60		dan LHKASN di kali 100%.	LHKASN
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	15	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	65	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP
		Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	50	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) INSPEKTUR DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020

1. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Jabatan : Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
3. Tugas : Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Fungsi :
1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.
 3. Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atau Penugasan dari Gubernur.
 4. Penyusunan Laporan dari Hasil Pengawasan.
 5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.
 6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
 7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerntahan Daerah	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja “ Tinggi “ sesuai hasil pemeriksaan/Audit	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
					dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Perangkat Daerah
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
		Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	85	Belum optimalnya tindak lanjut tas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaa di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	6	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	6	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	65 65	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN
		Jumlah Pelaporan	20	Belum optimalnya pelaporan atas	Jumlah Laporan Yang	Rekapitulasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
		Gratifikasi		penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Masuk dan ditangani oleh UPG	Laporan Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	70	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30	Belum dilaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Permenpan-RB	Pencapaian angka bobot/nilai sesuai dengan data pemenuhan dan reform	Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian RB Perangkat Daerah
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APiP.	Level kapabilitas APiP Inspektorat	3	Perlunya peningkatan Kapabilitas APiP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APiP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APiP
		Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	50	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) INSPEKTUR DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**

1. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Jabatan : Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
3. Tugas : Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.
3. Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atau Penugasan dari Gubernur.
4. Penyusunan Laporan dari Hasil Pengawasan.
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini WTP	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	4 PD	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja “ Tinggi “ sesuai hasil pemeriksaan/Audit	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level 3	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP	31 PD	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi	Rekapitulasi Hasil Evaluasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
		Katagori \geq B			SAKIP katagori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	SAKIP Perangkat Daerah
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	95 %	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
		Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	85 %	Belum optimalnya tindak lanjut tas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaa di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	6 Kab/kjota	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	6 Kab/Kota	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100 %	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	70 % 70 %	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	20 Laporan	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	75 Skor/ Nilai	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	1 PD	Belum semua perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36,30 Nilai / Bobot	Belum dilaksanakan penilaian Reformasi Birokrasi terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan amanat Permenpan-RB	Pencapaian angka bobot/nilai sesuai dengan data pemenuhan dan reform	Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian RB Perangkat Daerah
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP
		Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	55 Orang	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019- 2023**

1. Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Jabatan : Inspektur Provinsi Kalimantan Timur
3. Tugas : Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
2. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja dan Keuangan Melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya.
3. Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu atau Penugasan dari Gubernur.
4. Penyusunan Laporan dari Hasil Pengawasan.
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
7. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Gubernur sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

5. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I	Inspektur
		Jumlah Perangkat Daerah Yang berkinerja “ Tinggi “	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja “ Tinggi “ sesuai hasil pemeriksaan/Audit	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Belum optimalnya capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan operasional	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di bagi pagu anggaran Program dan Kegiatan di kali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	Belum optimalnya tindak lanjut pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriks di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim.	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP	Inspektur
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dibagi jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi x 100%.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat	Inspektur Bidang Pengawasan Khusus.
		Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	Belum optimalnya tindak lanjut pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriks di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin	Inspektur Bidang Pengawasan Khusus.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
		LHKPN				
		LHKASN				
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi	Unit Pengendalian Gratifikasi
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey	Inspektorat berkerjasama dengan BPS dan KPK.
		Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Belum semau perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM	Tim Internal dan Eksternal ZI Menuju WBK/WBBM
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Belum optimalnya nilai/skor penilaian atas RB pada Perangkat Daerah	Nilai / Skor RB yang didapat setelah dilakukan evaluasi melalui LKE RB	Laporan Hasil Penilaian RB PD	Tim RB Inspektorat
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP	Inspektorat berkerjasama dengan BPKP
		Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian	Inspektur

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP DARI
INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN SEBELUMNYA TAHUN 2019
(REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTINYA)**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut / Rencana Aksi	Belum / Sudah
1.	<p>Rencana Aksi atas Kinerja dimonitor</p> <p>Pencapaiannya secara berkala, dan tidak terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja</p>	<p>Pada tahun 2020 sudah dibuatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan setiap 3 bulan dilakukan evaluasi atas target dan capaian yang telah ditetapkan beserta anggarannya 2. Pada tahun tahun 2019-2020 Pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membuat Matrik Capaian Kinerja dan pada tahun 2020 Matrik Capaian Kinerja ini ditambah dengan dibuatkan nya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020. 	<p>Sudah dibuat Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Matrik Capaian Kinerja Tahun 2020.</p>
2.	<p>Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi</p> <p>Dalam Pencapaian kinerja yang dilaporkan (output) ataupun (outcome) untuk tetap mengupayakan peningkatan pencapaian sasaran/kinerja organisasi secara optimal dengan target dapat dicapai, capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi mengenai</p>	<p>Pada tahun 2020 dari Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan sebanyak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 3 Sasaran Strategis b. 17 Indikator Kinerja Sasaran <p>Dari hasil monev terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan tersebut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 indikator kinerja tercapai 100% 	<p>Pada tahun 2021 hal ini sudah dilakukan evaluasi atas penetapan kinerja, sehingga diharapkan atas target yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>Hasil evaluasi atas target indikator kinerja itu ditetapkan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2021.</p>

	kinerja dapat diandalkan.	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Indikator Kinerja tercapai diatas 100% • 5 Indikator Kinerja yang capaian antara 20 % s.d 95,38% • 1 Indikator Kinerja yang tidak tercapai dengan hasil 0 %. 	
--	---------------------------	--	--

SASARAN STRATEGIS			PROGRAM	KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
URAIAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN		
		TW 4 : 1 OPD								ditetapkan sebbagai WBK/WBBM
Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	a. Tenaga fungsional pengawasan yang bersertifikat	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 50 Orang	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas APIP dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Orang	90	2.767.000.000	Inspektur, Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
	b. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW4 : Level 3	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Laporan	1	135.000.000	Inspektur dan Irban-Irban dan Satgas Kapabilitas APIP	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
Operasional /Program/Kegiatan Generik/Overhead (Yang Tidak Mempunyai Sasaran Strategis)										
	a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	TW 1 : 3 bulan TW 2 : 3 bulan TW 3 : 3 bulan TW 4 : 3 bulan	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	bulan	12	1.516.600.000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah yang berhubungan dengan Administrasi Perkantoran.
	b. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	TW 1 :- TW 2 : 45 unit TW 3 :- TW 4 :- TW 1 : 3 unit TW 2 : 3 Unit TW 3 : 2 Unit TW 4 : 2 Unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Unit Unit	45 10	505.100.000 348.700.000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana aparatur
	c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda.	TW 1 : 15 Keg TW 2 : 15 Keg TW 3 : 15 Keg TW 4 : 15 Keg TW 1 : 15 Org TW 2 : 15 Org TW 3 : 15 Org TW 4 : 15 Org	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan Pemda Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kegiatan Orang	60 60	862.200.000 343.000.000	Inspektur, Sekretaris, Irban-Irban dan Kasubbag Inspektur, Sekretaris, Irban-Irban dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam bentuk pelatihan, bimtek, workshop dan seminar.
	d. Penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.	TW 1 : 2 Lap TW 2 : 2 Lap TW 3 : 2 Lap TW 4 : 1 Lap	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Dokumen	7	75.000.000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan mulai perencanaan sampai pelaksanaan.

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

SASARAN STRATEGIS				PROGRAM	KEGIATAN							PENANGGUNG JAWAB
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULAN		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TARGET TRIWULAN	ANGGARAN	
1	2		3	4	5	6	7	8			9	10
Meningkatkan pengendalian internal Pemerintah Daerah	a. Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	TW 1 : - TW 2 : WTP TW 3 : - TW 4 : -	Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Pemrov dan OPD yang direviu	Laporan	16	Melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	TW 1 : - TW 2 : WTP TW 3 : - TW 4 : -	457.450.000	Inspektur dan Irban-Irban
	b. Jumlah perangkat daerah yang berkinerja Tinggi	PD	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 2 TW 4 : -	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Pemeriksaan Kinerja OPD	Jumlah Laporan Audit Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	Melakukan Audit atas Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Identifikasi Risiko yang dibuat dalam rangka 3 E	TW 1 : - TW 2 : 2 TW 3 : 6 TW 4 : -	388.250.000	Inspektur dan Irban-Irban
	c. Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 92	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Pemeriksaan Operasional OPD	Jumlah Laporan Operasional / Ketataan Perangkat Daerah	Laporan	35	Melakukan Pemeriksaan Ketataan atas 5 Aspek, yaitu Anggaran, SDM, Kebijakan, BMD, Tugas dan Pokok dan Fungsi PD	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 18 TW 4 : 17	960.050.000	Inspektur dan Irban-Irban
	d. Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 3	Peningkatan Kapabilitas APIP	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Laporan	1	Melakukan penilaian atas Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Perangkat Daerah	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 1 TW 4 : -	225.000.000	Inspektur dan Irban-Irban dan Satgas Maturitas SPIP
	e. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori ≥ B	PD	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 29 TW 4 : -	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP Perangkat Daerah	Laporan	38	Melakukan evaluasi atas LKJP / Kinerja Perangkat Daerah dengan Permenpan	TW 1 : - TW 2 : 38 TW 3 : - TW 4 : -	443.710.000	Inspektur dan Irban-Irban
	f. Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persen	TW 1 : - TW 2 : 40 TW 3 : - TW 4 : 40	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Movev TLHP	Laporan	2	Melakukan movev atas Laporan Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti oleh perangkat daerah sesuai rekomendasi hasil pengawasan	TW 1 : - TW 2 : 38 TW 3 : - TW 4 : -	315.700.000	Inspektur dan Irban-Irban dan Sub bidang Perencanaan
	g. Persentase Pelanggaran Disiplin yang di tindaklanjuti/ditangani	Persen	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 85	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	Laporan	7	Melakukan movev atas Laporan Hasil Pengawasan Pelanggaran Disiplin yang ditindak lanjuti.	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 7		
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Pemda Kab/Kota yang dievaluasi	Kab/Kota	10	Melakukan Evaluasi atas LPD Kab/Kota sesuai dengan amanat PP No. 6 Tahun 2008	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 10 TW 4 : -	1.026.290.000	Inspektur dan Irban-Irban dan BPKP Perwakilan
	b. Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Kategori B	Kab/Kota	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah Laporan SAKIP Pemda Kab/Kota yang dievaluasi	Laporan	10	Melakukan Evaluasi atas LKJP Kab/Kota sesuai dengan Surat Kementerian PAN-RB	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 10 TW 4 : 7-	631.710.000	Inspektur dan Irban-Irban
Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Persen	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 100	Pencegahan KKN	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Laporan	20	Melakukan Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat yang diterima dalam membuktikan kebenarannya	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 20	531.990.000	Inspektur dan Irban Khusus
	b. Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	Persen	TW 1 : - TW 2 : -	Pencegahan KKN	Movev LHKPN dan LHKASN	Jumlah Laporan Hasil Movev LHKPN dan LHKASN	Laporan	2	Melakukan Movev atas Kepatuhan Penyampaian	TW 1 : - TW 2 : 2	75.500.000	Inspektur dan Irban-Irban

SASARAN STRATEGIS				PROGRAM	KEGIATAN							PENANGGUNG JAWAB	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULAN		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TARGET TRIWULAN	ANGGARAN		
	c.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	TW 3 :-	Pencegahan KKN	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	Laporan	25	LHKPN dan LHKASN	TW 3 :-	134.380.000	Inspektur dan Irban-Irban serta Tim UPG
				TW 4 : 65							TW 4 :-		
				TW 1 :-							TW 1 :-		
				TW 2 :-							TW 2 :-		
	d.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	TW 3 :-	Pencegahan KKN	Survey Penilaian Integritas	Jumlah kegiatan Survey Penilaian Integritas yang dilaksanakan	Kegiatan	1	Melakukan Survey Penilaian Integritas kepada Perangkat Daerah yang bersifat Pelayanan Publik	TW 3 :-	165.550.000	Sekretaris beserta Tim BPS Prov. Kaltim
				TW 4 : 20							TW 4 : 25		
				TW 1 :-							TW 1 :-		
				TW 2 :-							TW 2 :-		
	e.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM	PD	TW 3 :-	Pencegahan KKN	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Laporan Zona Integritas pada perangkat daerah	Laporan	5	Melakukan penilaian Zone Integritas atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI	TW 3 :-	149.370.000	Inspektur dan Irban-Irban dan Tim Eksternal ZI
				TW 4 : 70							TW 4 : 1		
				TW 1 :-							TW 1 :-		
				TW 2 :-							TW 2 :-		
	f.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PD	TW 4 : 1	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil penilaian mandiri RB oleh Perangkat Daerah	Laporan	10	Melakukan Penilaian atas Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi pilot project	TW 4 :-	102.950.000	Inspektur dan Irban PA
				TW 1 :-							TW 1 :-		
				TW 2 :-							TW 2 : 10		
				TW 3 :-							TW 3 :-		
TW 4 : 10 OPD, 36,30				TW 4 :-									
Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	a.	Tenaga fungsional pengawasan yang bersertifikat	Orang	TW 1 :-	Peningkatan Kapabilitas APIP	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah peningkatan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang diikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	104	Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Wawasan	TW 1 : 52	1.947.325.000	Inspektur, Irban-Irban, Sekretaris dan Sub Bag Umum
				TW 2 :-							TW 2 : 52		
				TW 3 :-							TW 3 :-		
				TW 4 : 50							TW 4 :-		
	b.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	TW 4 : 3	Peningkatan Kapasitas APIP	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Laporan	1	Melakukan Penilaian atas Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai dengan 6 elemen penilaian	TW 1 :-	487.175.000	Inspektur dan Irban-Irban dan Satgas Kapabilitas APIP
				TW 1 :-							TW 1 :-		
				TW 2 :-							TW 2 :-		
				TW 3 :-							TW 3 :-		
Operasional /Program/Kegiatan Generik/Overhead (Yang Tidak Mempunyai Sasaran Strategis)													
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	a.	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	Persen	TW 1 :-	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	bulan	12	Melakukan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan perangkat daerah	TW 1 : 3	1.812.482.560	Inspektur, Sekretaris dan Para Kasubbag
				TW 2 :-							TW 2 : 3		
				TW 3 :-							TW 3 : 3		
				TW 4 : 85							TW 4 : 3		
	b.	Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	TW 4 : 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia	Unit	10	Melalukan penyediaan sarana dan prasaran dalam rangka meningkat pelayanan unit kerja perangkat daerah	TW 1 :-	850.600.000	Inspektur, Sekretaris, Irban-Irban dan Sub Bag Umum
				TW 1 :-							TW 2 : 10		
				TW 2 :-							TW 3 :-		
				TW 3 :-							TW 4 :-		
	c.	Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	Persen	TW 4 : 85	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peningkatan Sumber Daya Aparatur yang diikutsertakan dalam pelatihan	Orang	76	Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pelatihan	TW 1 : 38	1.213.800.000	Inspektur, Irban-Irban, Sekretaris dan Sub Bag Umum
				TW 1 :-							TW 2 : 38		
				TW 2 :-							TW 3 :-		
				TW 3 :-							TW 4 :-		
	d.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	TW 4 :-	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat.	Dokumen	9	Membuat laporan pengendalian dan evaluasi - pelaksanaan kegiatan	TW 1 : 2	462.050.000	Inspektur, Sekretaris dan Para Kasubbag
				TW 1 :-							TW 2 : 2		
				TW 2 :-							TW 3 : 2		
				TW 3 : 78							TW 4 : 3		

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

SASARAN STRATEGIS				PROGRAM	KEGIATAN							PENANGGUNG JAWAB
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULAN		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TARGET TRIWULAN	ANGGARAN	
1	2		3	4	5	6	7	8			9	10
Meningkatkan pengendalian internal Pemerintah Daerah	a. Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Opini	TW 1 :- TW 2 : WTP TW 3 :- TW 4 :-	Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Pemprov dan OPD yang direviu	Laporan	16	Melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	TW 1 :- TW 2 : WTP TW 3 :- TW 4 :-	457.450.000	Inspektur dan Irban-Irban
	b. Jumlah perangkat daerah yang berkinerja Tinggi	PD	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 : 2 TW 4 :-	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Pemeriksaan Kinerja OPD	Jumlah Laporan Audit Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	Melakukan Audit atas Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah sesuai dengan Identifikasi Risiko yang dibuat dalam rangka 3 E	TW 1 :- TW 2 : 2 TW 3 : 6 TW 4 :-	388.250.000	Inspektur dan Irban-Irban
	c. Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 95	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Pemeriksaan Operasional OPD	Jumlah Laporan Operasional / Ketataan Perangkat Daerah	Laporan	35	Melakukan Pemeriksaan Ketataan atas 5 Aspek, yaitu Anggaran, SDM, Kebijakan, BMD, Tugas dan Pokok dan Fungsi PD	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 : 18 TW 4 : 17	960.050.000	Inspektur dan Irban-Irban
	d. Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 3	Peningkatan Kapabilitas APIP	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Laporan	1	Melakukan penilaian atas Pengendalian Internal yang dilakukan oleh Perangkat Daerah	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 : 1 TW 4 :-	225.000.000	Inspektur dan Irban-Irban dan Satgas Maturitas SPIP
	e. Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Kategori ≥ B	PD	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 : 31 TW 4 :-	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi atas SAKIP Perangkat Daerah	Laporan	38	Melakukan evaluasi atas LKJP / Kinerja Perangkat Daerah dengan Permenpan	TW 1 :- TW 2 : 38 TW 3 :- TW 4 :-	443.710.000	Inspektur dan Irban-Irban
	f. Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persen	TW 1 :- TW 2 : 45 TW 3 :- TW 4 : 40	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Movev TLHP	Laporan	2	Melakukan movev atas Laporan Hasil Pengawasan yang ditindak lanjuti oleh perangkat daerah sesuai rekomendasi hasil pengawasan	TW 1 :- TW 2 : 38 TW 3 :- TW 4 :-	315.700.000	Inspektur dan Irban-Irban dan Sub bidang Perencanaan
	g. Persentase Pelanggaran Disiplin yang di tindaklanjuti/ditangani	Persen	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 85	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	Laporan	7	Melakukan movev atas Laporan Hasil Pengawasan Pelanggaran Disiplin yang ditindak lanjuti.	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 7		
	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Pemda Kab/Kota yang dievaluasi	Kab/Kota	10	Melakukan Evaluasi atas LPD Kab/Kota sesuai dengan amanat PP No. 6 Tahun 2008	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 : 10 TW 4 :-	1.026.290.000	Inspektur dan Irban-Irban dan BPKP Perwakilan
	b. Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Kategori B	Kab/Kota	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 6	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah Laporan SAKIP Pemda Kab/Kota yang dievaluasi	Laporan	10	Melakukan Evaluasi atas LKJP Kab/Kota sesuai dengan Surat Kementerian PAN-RB	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 : 10 TW 4 : 7-	631.710.000	Inspektur dan Irban-Irban
	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persen	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 100	Pencegahan KKN	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Laporan	20	Melakukan Pemeriksaan atas Pengaduan Masyarakat yang diterima dalam membuktikan kebenarannya	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 20	531.990.000	Inspektur dan Irban Khusus
	b. Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	Persen	TW 1 :- TW 2 :-	Pencegahan KKN	Movev LHKPN dan LHKASN	Jumlah Laporan Hasil Movev LHKPN dan LHKASN	Laporan	2	Melakukan Movev atas Kepatuhan Penyampaian	TW 1 :- TW 2 : 2	75.500.000	Inspektur dan Irban-Irban

SASARAN STRATEGIS				PROGRAM	KEGIATAN							PENANGGUNG JAWAB
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULAN		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	RENCANA AKSI KEGIATAN	TARGET TRIWULAN	ANGGARAN	
			TW 3 :- TW 4 : 70						LHKPN dan LHKASN	TW 3 :- TW 4 :-		
	c. Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 20	Pencegahan KKN	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	Laporan	25	Melakukan pengendalian laporan Gratifikasi yang diterima Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 25	134.380.000	Inspektur dan Irban-Irban serta Tim UPG
	d. Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 75	Pencegahan KKN	Survey Penilaian Integritas	Jumlah kegiatan Survey Penilaian Integritas yang dilaksanakan	Kegiatan	1	Melakukan Survey Penilaian Integritas kepada Perangkat Daerah yang bersifat Pelayanan Publik	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 1	165.550.000	Sekretaris beserta Tim BPS Prov. Kaltim
	e. Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM	PD	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 1	Pencegahan KKN	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Laporan Zona Integritas pada perangkat daerah	Laporan	5	Melakukan penilaian Zone Integritas atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 : 5 TW 4 :-	149.370.000	Inspektur dan Irban-Irban dan Tim Eksternal ZI
	f. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	PD	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 36,30	Peningkatan Sistem Pengendalian Internal	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil penilaian mandiri RB oleh Perangkat Daerah	Laporan	10	Melakukan Penilaian atas Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi pilot project	TW 1 :- TW 2 : 10 TW 3 :- TW 4 :-	102.950.000	Inspektur dan Irban PA
Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP	a. Tenaga fungsional pengawasan yang bersertifikat	Orang	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 55	Peningkatan Kapabilitas APIP	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah peningkatan kapabilitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang diikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan	Orang	104	Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Pengembangan Wawasan	TW 1 : 52 TW 2 : 52 TW 3 :- TW 4 :-	1.947.325.000	Inspektur, Irban-Irban, Sekretaris dan Sub Bag Umum
	b. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 3	Peningkatan Kapasitas APIP	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP	Laporan	1	Melakukan Penilaian atas Kapabilitas APIP Inspektorat sesuai dengan 6 elemen penilaian	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 1	487.175.000	Inspektur dan Irban-Irban dan Satgas Kapabilitas APIP
Operasional /Program/Kegiatan Generik/Overhead (Yang Tidak Mempunyai Sasaran Strategis)												
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	Persen	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 85	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	bulan	12	Melakukan pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan perangkat daerah	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3	1.812.482.560	Inspektur, Sekretaris dan Para Kasubbag
	b. Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia	Unit	10	Melakukan penyediaan sarana dan prasaran dalam rangka meningkat pelayanan unit kerja perangkat daerah	TW 1 :- TW 2 : 10 TW 3 :- TW 4 :-	850.600.000	Inspektur, Sekretaris, Irban-Irban dan Sub Bag Umum
	c. Persentase ASN yang Memiliki Standar Kompetensi	Persen	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 :- TW 4 : 85	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah peningkatan Sumber Daya Aparatur yang diikutsertakan dalam pelatihan	Orang	76	Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Pelatihan	TW 1 : 38 TW 2 : 38 TW 3 :- TW 4 :-	1.213.800.000	Inspektur, Irban-Irban, Sekretaris dan Sub Bag Umum
	d. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	TW 1 :- TW 2 :- TW 3 : 78 TW 4 :-	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang dibuat.	Dokumen	9	Membuat laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	TW 1 : 2 TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 3	462.050.000	Inspektur, Sekretaris dan Para Kasubbag